STRATEGI *TRANSNATIONAL ADVOCACY NETWORK* BENNY WENDA DALAM UPAYA SEPARATISME PAPUA BARAT PADA TAHUN 2013-2020

SKRIPSI

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Diajukan Oleh:

Alfiah Noor Rochmiati

14323091

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS PSIKOLOGI ILMU SOSIAL BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2021

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Hubungan Internasional

Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat Guna Memperoleh

Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Oleh:

ALFIAH NOOR ROCHMIATI

14323091

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2021

HALAMAN PENGESAHAN

Strategi *Transnational Advocacy Network* Benny Wenda Dalam Upaya Separatisme Papua Barat Pada Tahun 2013-2020

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat Guna Memperoleh Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional

Pada Tanggal

19 Agustus 2021

Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional

Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya

Universitas Islam Indonesia

Ketua Program Studi

Hangga Fathana, SIP,. B.Int,.St,.M.A.

Dewan Penguji	Tanda Tangan
1. Hangga Fathana., S.I.P., B.Int., St,. M.A	
2. Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A	
3. Enggar Furi Herdianto, S.I.P., M.A	

PERNYATAAN ETIKA AKADEMIK

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Alfiah Noor Rochmiati

No. Mahasiswa : 14323091

Program Studi : Hubungan Internasional

Judul Skripsi : Strategi *Transnational Advocacy Network* Benny Wenda Dalam Upaya Separatisme Papua Barat Pada Tahun 2013-2020

Melalui surat ini saya menyatakan bahwa:

1. Selama melakukan penelitian dan pembuatan laporan penelitian skripsi saya tidak melakukan tindakan pelanggaran etika akademik dalam bentuk apapun, seperti penjiplakan, pembuatan skripsi oleh orang lain, atau pelanggaran lain yang bertentangan dengan etika akademik yang dijunjung tinggi Universitas Islam Indonesia. Karena itu, skripsi yang saya buat merupakan karya ilmiah saya sebagai peneliti, bukan karya jiplakan atau karya orang lain
2. Apabila dalam ujian skripsi saya terbukti melanggar etika akademik, maka saya siap menerima sanksi sebagaimana aturan yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.
3. Apabila dikemudian hari, setelah saya lulus dari Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Universitas Islam Indonesia ditemukan bukti secara meyakinkan bahwa skripsi ini adalah karya jiplakan atau karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang ditetapkan Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 23 Agustus 2021

Yang menyatakan



Alfiah Noor R

HALAMAN MOTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

"Habis gelap terbitlah terang"

-RA Kartini-

"Selama ada niat dan keyakinan maka semua akan menjadi mungkin"

-Bapak-

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas nikmat dan karunia yang diberikan, serta segala kekuatan, kemudahan, hingga kelancaran sehingga dapat menyelesaikan penelitian ini. Serta sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Peneliti menyadari dalam menyelesaikan skripsi ini banyak pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan, dan dukungan moral. Oleh karena itu, pada kesempatan ini perkenankan peneliti untuk mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Hangga Fathana., S.I.P., B.Int., St,. M.A selaku Ketua Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Skripsi. Terima kasih atas ilmu, saran, dan arahan yang telah diberikan. Semoga Allah SWT membalas kebaikan Bapak.
2. Ibu Karina Utami Dewi S.I.P., M.A., selaku Dosen Pembimbing Akademik. Terima kasih atas ilmu, bimbingan, dan motivasi selama masa pembelajaraan di Program Studi Hubungan Internasional.
3. Seluruh dosen Program Studi Hubungan Internasional yang telah memberikan banyak ilmu, pelajaran, pengalaman, serta nasihat selama masa pembelajaran.
4. Seluruh staf Program Hubungan Internasional, staf Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, dan staf Perpustakaan Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan kemudahan atas segala urusan akademik

5. Kedua orang tua saya, Bapak dan Ibu yang selalu memberikan doa, kasih saying, serta dukungan hingga skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Ketiga kakak kandung yang selalu memberi dukungan dan dorongan positif untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Teman-teman perkuliahan di Program Studi Hubungan Internasional Ratih, Sarini, Rosi, Syahagum, dan Riflan yang telah berbagi dukungan, kebersamaan, dan kesenangan selama masa perkuliahan ini.
8. Adelia, Qodri, Ungky, Shelly, dan Desy yang telah berbagi suka dan duka selama masa penulisan skripsi ini.
9. Keluarga besar organisasi Marching Band Universitas Islam Indonesia, yang selama masa perkuliahan telah memberikan banyak pengalaman.
10. Andi Muhammad Nurul Hasyir, yang selama masa penulisan skripsi ini telah menjadi tempat mengeluh dan juga memberikan banyak dukungan, motivasi, serta kasih sayang.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN ..... **i**
PERNYATAAN ETIKA AKADEMIK ..... **ii**
HALAMAN MOTO ..... **iii**
KATA PENGANTAR ..... **iv**
DAFTAR ISI ..... **vi**
DAFTAR TABEL ..... **viii**
DAFTAR GAMBAR ..... **ix**
DAFTAR SINGKATAN ..... **x**
ABSTRAK ..... **xi**
BAB 1 PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 3
1.3 Tujuan Penelitian 3
1.4 Signifikansi Penelitian 3
1.5 Cakupan Penelitian 4
1.6 Tinjauan Pustaka 5
1.7 Landasan konseptual 10
1.8 Metode Penelitian 14
1.8.1 Jenis Penelitian 14
1.8.2 Subyek Penelitian 15
1.8.3 Alat Pengumpul Data 15
1.8.4 Proses Penelitian 15
BAB 2 FAKTOR PEMICU YANG MEMENGARUHI BENNY WENDA DALAM UPAYA SEPARATISME PAPUA BARAT **16**
2.1 Boomerang Pattern Yang Terjadi Akibat Adanya Konflik di Papua 17
2.1.1 Sejarah Integrasi Papua ke Dalam Wilayah Indonesia 17
2.1.2 Operasi Militer dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Papua 18
2.1.3 Marjinalisasi Orang Papua 19
2.1.4 Terlambatnya Pembangunan Di Papua 20
2.2 Benny Wenda Sebagai Political Entreupreuners 22

2.2.1 Jaringan Yang Dibentuk Oleh Benny Wenda 25

BAB 3 30

ANALISIS STRATEGI *TRANSNATIONAL ADVOCAVY NETWORK* YANG DIGUNAKAN OLEH BENNY WENDA DALAM UPAYA SEPARATISME 30

3.1 Strategi *Transnasional Advocacy Network* 30

3.1.1 Analisis Taktik *Information Politics* Yang Dilakukan Oleh Benny Wenda 31

3.1.2 Analisis Taktik *Symbolic Politics* Yang Dilakukan Oleh Benny Wenda 33

3.1.3 Analisis Taktik *Leverage Politics* Yang Dilakukan Oleh Benny Wenda 36

3.1.4 Analisis Taktik *Accountability Politics* Yang Dilakukan Oleh Benny Wenda 41

3.2 Pencapaian Dari Pengaruh Benny Wenda Untuk Melakukan Separatisme 45

BAB 4 48

PENUTUP 48

4.1 Kesimpulan..... 48

4.2 Rekomendasi Penelitian..... 51

DAFTAR PUSTAKA 52

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Upaya Diplomasi Yang Dilakukan Oleh Benny Wenda 38
Tabel 3. 2 Strategi *Transnational Advocacy Network* Yang Dilakukan Oleh Benny Wenda 44

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Boomerang Pattern 13
Gambar 3. 1 Salah Satu Peserta #GlobalFlagRaising 35
Gambar 3. 2 Poster Rockin' For West Papua Concert 36

DAFTAR SINGKATAN

AFC	: Act of Free Choice
AMP	: Aliansi Mahasiswa Papua
FWPC	: Free West Papua Campaign
HAM	: Hak Asasi Manusia
ILWP	: International Lawyers for West Papua
IPWP	: Intenational Parliamenterians for West Papua
KNPB	: Komite Nasional Papua Barat
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
MSG	: Melanesian Spearhead Group
NKRI	: Negara Kesatuan Republik Indonesia
OPM	: Organisasi Papua Merdeka
Pepera	: Pendapat Penentuan Rakyat
PBB	: Persatuan Bangsa-Bangsa
TAN	: Transnational Advocacy Network
ULMWP	: United Liberation Movement for West Papua

ABSTRAK

Sejak masa integrasi wilayah Papua Barat ke wilayah Indonesia, telah banyak penolakan oleh kelompok separatisme. Banyaknya konflik yang terjadi setelah referendum seperti Operasi Militer yang merenggut banyak korban dan memicu tindak pelanggaran hak asasi manusia, termarjinalkannya orang asli Papua, dan terlambatnya pembangunan di Papua membuat kelompok separatisme geram dan menginginkan adanya referendum ulang dan menentukan hak atas nasibnya sendiri. Salah satu aktivis pro kemerdekaan Papua Barat yang dengan vocal dan secara konsisten menggalang dukungan dari masyarakat internasional, yaitu Benny Wenda. Dengan menggunakan kekuatan media informasi dan media sosial, Benny Wenda berhasil memberikan kesadaran pada masyarakat internasiona dan mendapat dukungan dari aktor negara maupun aktor non-negara. Dengan menggunakan taktik jaringan advokasi, Benny Wenda sebagai aktivis memanfaatkan jaringan advokasi yang dibentuknya sebagai jalan untuk mencapai tujuannya. Penelitian ini mencoba untuk mengidentifikasi upaya yang dilakukan oleh Benny Wenda untuk memengaruhi perilaku negara melalui taktik yang dilakukannya. Temuan pada penelitian ini telah menghasilkan pencapaian dari Benny Wenda dalam membangun pengaruh pada aktor negara dan aktor non-negara.

Kata Kunci : *Transnational Advocacy Network*, *Boomerang Pattern, Political entrepreunership*, Aktivis, Benny Wenda, Separatisme Papua Barat.

ABSTRACT

Since West Papua was merged into Indonesian territory, it has been rejected by separatist groups many times. The many conflicts that occurred after the referendum, such as military operations that caused many casualties and human rights violations, the marginalization of indigenous Papuans, and the lagging development of Papuans, caused separatist groups to furious and demand a re-referendum and confirm their rights. For my own destiny. Benny Wenda (Benny Wenda) is one of the West Papua activists who support independence. He has been verbal and continues to receive support from the international community. By using the power of information media and social media, Bennivenda successfully raised the awareness of the international community and gained support from state and non-state actors. Through the use of advocacy network strategies, as an activist, Benny Wenda uses the propaganda network he has formed as a way to achieve his goals. This research attempts to determine Benny Wenda's efforts to influence state behavior through his strategy. The results of this research contributed to Benny Wenda's achievements in building influence on state and non-state actors.

Keywords : Transnational Advocacy Network, Boomerang Pattern, Political entrepreunership, Activists, Benny Wenda, West Papua Separatism.

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia termasuk negara kepulauan yang memiliki beragam kelompok agama, etnis dan suku yang menjadi ciri tersendiri bagi Indonesia. Namun, dengan banyaknya keberagaman ini menjadi suatu tantangan bagi pemerintah agar tidak terjadi kesenjangan sosial dan menimbulkan pergolakan dari rakyat yang ingin memisahkan diri dari Indonesia karena tidak adanya keadilan yang merata. Banyaknya perbedaan yang ada di Indonesia inilah yang menjadi keunggulan juga menjadi salah satu pemicu masalah dan ketegangan yang terjadi di Indonesia, tidak heran banyaknya gerakan separatis yang muncul di Indonesia seperti di Aceh, Papua, dan juga Timor Leste yang pada akhirnya berhasil memisahkan diri dari Indonesia pada tahun 1999 silam.

Hubungan antara Papua dengan Pemerintah Indonesia memang sudah bermasalah sejak tahun 1963, disaat wilayah Papua Barat mulai berintegrasi ke wilayah Indonesia. Wilayah Papua sendiri resmi tergabung dengan Indonesia sejak disepakatinya Perjanjian New York pada tahun 1962, diperkuat dengan adanya Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) pada tahun 1969 yang disahkan oleh PBB pada tahun 1969 melalui resolusi PBB No. 2504. Namun, kelompok separatisme menganggap bahwa perjanjian tersebut melanggar hak asasi rakyat Papua yang ingin membebaskan diri dan menentukan nasibnya sendiri. Menurut kelompok separatisme, seharusnya hal ini dilakukan dengan pemilihan bukan hanya dengan perwakilan. Perwakilannya pun hanya 0,2% dari keseluruhan rakyat Papua saat itu dan mengalami tekanan dan ancaman dari pihak Indonesia. Konflik mulai semakin

memanas saat Organisasi Papua Merdeka memproklamasikan pemerintahan revolusi Papua Barat dan setelah itu banyak terjadi kekerasan yang dilakukan oleh militer Indonesia sejak saat itu sampai sekarang, walaupun intensitasnya sudah berkurang setelah reformasi politik tahun 1998. Masalah lain yang memicu konflik di Papua adalah depopulasi penduduk Papua sejak 1970 dan marjinalisasi penduduk asli Papua dalam rangka pembangunan sosial ekonomi. Selain itu, Papua juga termasuk provinsi miskin padahal sumber daya alamnya terbilang cukup kaya. Masalah-masalah ini yang menimbulkan ketidakpercayaan pada pemerintah Indonesia (Pamungkas, 2017, pp. 147-149).

Eskalasi dari konflik yang terjadi di tanah Papua adalah munculnya gerakan-gerakan separatisme lainnya selain OPM. Salah satu kelompok separatisme yaitu *United Liberation Movement for West Papua* (ULMWP) yang diumumkan di Port Vila, Republik Vanuatu, tahun 2014 kemarin yang dibentuk oleh Benny Wenda dan saat ini ia menjabat sebagai ketuanya. Tugas ULMWP sendiri yaitu menyerukan Papua merdeka di level internasional guna mendapatkan simpati dan dukungan politik dari berbagai negara, maupun aktor non-negara. Kelompok separatisme ini mengusung isu hak asasi manusia (HAM) dan demokrasi untuk menarik simpatisan (Sabir, 2018, pp. 92-95).

Isu separatisme Papua tidak lagi menjadi isu nasional tetapi sudah menjadi isu internasional. Salah satu tokoh separatisme kontroversial dan menarik perhatian pemerintah Indonesia yaitu Benny Wenda yang saat ini menjadi warga negara asing di Oxford, Inggris. Benny Wenda pernah ditangkap sebelumnya pada tahun 2002 atas tuduhan penyerangan terhadap kantor polisi di Abepura, tetapi berhasil kabur karena adanya bantuan dari kelompok LSM Eropa dan mendapatkan suaka dari

Inggris pada tahun 2003 sampai saat ini (Damarjati, 2019). Benny yang saat ini menjadi warga negara asing masih memperjuangkan kemerdekaan Papua di kancah internasional dan berhasil membentuk *International Parliamentarians for West Papua (IPWP)* dan juga *International Lawyers for West Papua (ILWP)* (Taum, 2015, pp. 9-11).

Dengan adanya kelompok-kelompok yang telah dibentuk sedemikian rupa oleh para tokoh gerakan separatis termasuk Benny Wenda untuk Papua menjadi sesuatu yang menarik untuk dianalisis secara keseluruhan, mulai pada terbentuknya organisasi-organisasi lokal hingga mencari dukungan dari negara-negara lain maupun organisasi non-pemerintah.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana strategi advokasi yang dilakukan oleh Benny dalam upaya separatisme Papua Barat?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Memetakan strategi *Transnational Advocacy Network* yang dilakukan oleh Benny Wenda dalam melakukan separatisme Papua dari Indonesia.
2. Mengetahui pengaruh dari strategi *Transnational Advocacy Network* yang Benny Wenda lakukan.

1.4 Signifikansi Penelitian

Kelompok separatisme Papua sampai saat ini masih sering meresahkan pemerintah dan mengancam integrasi nasional yang coba dibangun oleh pemerintah Indonesia. Hal ini menarik untuk dikaji karena dirasa mengancam sistem demokrasi yang telah dianut oleh Indonesia selama ini, yang seharusnya dengan sistem ini

negara perlu mendengarkan pendapat rakyat, tapi di satu sisi kelompok separatisme seperti ini dapat memecah-belah kesatuan NKRI.

Dengan adanya penelitian ini penulis ingin melihat alasan-alasan yang memicu Papua untuk memisahkan diri dengan Indonesia dan munculnya kelompok maupun individu yang mencoba memprovokasi dalam pembebasan Papua. Selain itu, hal yang akan disoroti disini adalah bagaimana Benny Wenda sebagai aktor non-negara mendapatkan dukungan-dukungan dari negara lain maupun LSM internasional dan menarik simpati di dunia internasional. Dalam penelitian ini akan dikaji keterlibatan negara yang berafiliasi dengan gerakan separatisme di Papua. Adanya penelitian ini juga akan melihat upaya diplomasi yang dilakukan Benny Wenda guna mempengaruhi dan menggiring opini suatu negara dan kelompok non-negara untuk mendukung kemerdekaan di Papua.

1.5 Cakupan Penelitian

Skripsi ini akan berfokus pada tahun 2013-2020 saat Benny Wenda memulai "*Freedom Tour*" ke wilayah-wilayah Melanesia, Afrika, Amerika, dan juga Australia, dengan tur yang dia buat terlihat keseriusan Benny Wenda untuk membebaskan Papua Barat dan melihat upaya-upaya lain yang dilakukannya untuk mendapatkan dukungan dari negara-negara dan komunitas lainnya akibat dari tidak ditemukannya titik terang dengan Pemerintah Indonesia.

Yang menjadi fokus analisis dalam penelitian ini yaitu, Benny Wenda melakukan upaya-upaya dan mencari dukungan internasional untuk memberikan tekanan pada Pemerintah Indonesia. Sehingga, dengan adanya dukungan internasional, Benny Wenda merasa bahwa Pemerintah Indonesia akan bersedia untuk melakukan referendum ulang atas Papua.

Dalam cakupan waktu yang telah ditentukan, penulis melihat adanya perkembangan isu kemerdekaan Papua Barat dari isu nasional menjadi isu internasional yang menarik perhatian yang lebih besar dari sebelumnya.

1.6 Tinjauan Pustaka

Adanya isu separatisme ini juga menjadi sorotan dunia internasional. Kelompok separatisme diam-diam menggalang dukungan dan membentuk organisasi di luar negeri. Pembentukan ini membuat resah keadaan negara dan mengancam ketahanan dan perdamaian negara.

Dalam bagian tinjauan pustaka ini, penulis akan menjadikan beberapa buku maupun jurnal yang membahas mengenai gerakan separatisme di Papua yang berkembang di dunia internasional sebagai pendukung maupun perbandingan dalam menulis penelitian ini.

Dalam buku *Updating Papua Road Map* dijabarkan dengan gamblang proses perdamaian dengan pemerintah yang selalu tak berujung pada kesepakatan. Hal yang menjadi permasalahan di Tanah Papua seperti kekerasan dan pelanggaran HAM masa lalu masih menjadi teka-teki yang belum dapat terselesaikan. Pemerintah disini lebih fokus pada proses pembangunan ekonomi dan infrastruktur di Papua yang dapat lebih menguntungkan untuk menarik investor dan pariwisata. Hal ini memang penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi hal lain yang memiliki pengaruh penting lainnya seperti hak masyarakat adat dan perlindungan HAM tidak berjalan dengan baik.

Seiring berjalannya waktu kelompok separatisme ini tidak hanya dikembangkan oleh kaum tua, tapi juga kaum muda dari para mahasiswa. Kaum muda ini ikut berpartisipasi dalam membentuk gerakan separatisme yang memiliki

tujuan yaitu menumbuhkan sifat kritis. Pasca-reformasi, gerakan ini mulai berkembang menjadi lebih militan dan terorganisir sehingga pemerintah menganggap gerakan kaum muda ini seperti musuh negara. Padahal seharusnya pemerintah lebih mendengarkan dan mengakomodasi sehingga terbangun komunikasi yang baik bukan sebaliknya (Rusdiarti & Pamungkas, 2017, pp. 100-143).

Buku lain berjudul *Papua's Insecurity* yang ditulis oleh Bobby Anderson menjelaskan alasan-alasan mengapa Papua menjadi daerah yang tidak aman. Salah satu alasannya adalah tidak adanya dominasi dari pemerintah dan menyebabkan keterlantaran dan banyaknya kekerasan terjadi di beberapa daerah di Papua.Dalam penjabarannya, Bobby menjelaskan bahwa ketidak-amanan yang terjadi di Papua terdapat empat sumber, yaitu dari pemerintah, aparat negara, suku, dan kelompok separatisme itu sendiri.

Pemerintah Indonesia disini menjadi salah satu sumber yang membuat tidak aman karena pemerintah tidak memiliki kebijakan yang koheren terhadap Papua. Meskipun ada kebijakan yang mengatur keamanan dan industri, tetapi tidak ada kebijakan yang mengatur masalah kesehatan, pendidikan, pembangunan, migrasi, dan sektor lain. Pengabaian dan toleransi akan kekerasan menimbulkan rasa tidak aman pada masyarakat, khususnya yang berada di daerah terpencil. Dilihat dari sumber kedua, aparat negara seperti yang kita ketahui pada era orde baru di Papua terjadi kekerasan brutal yang dilakukan oleh militer dan bahkan hal itu dilakukan atas perintah atasan, dan tidak ada sanksi tegas pada apa yang telah dilakukannya. Meskipun setelah masa orde baru selesai, tetapi gambaran akan aparat keamanan

yang mengerikan masih menjadi bayang-bayang kelam dan menakutkan bagi mereka, meskipun pada saat masa reformasi kekerasan itu mulai berkurang.

Konflik antar suku juga sering terjadi di Papua dan menimbulkan korban yang lebih banyak daripada konflik dengan aparat keamanan negara ataupun dengan separatis. Biasanya konflik antar suku menjadi perhatian publik apabila hal itu meyangkut kepentingannya, seperti mencari dukungan politik. Pemicu adanya konflik antar suku juga dikarenakan adanya perlombaan politik. Maksudnya disini adalah suku lain ingin lebih unggul daripada suku yang lainnya, seperti kejadian pada tahun 2012 silam pada pemilihan bupati di Papua antara suku Bogoga dan suku Wanui yang berakhir dengan adanya pertengkaran yang memakan korban.

Sumber keempat dari ketidakamanan wilayah Papua ini adalah kelompok separatisme. Selain menimbulkan ketidakamanan di wilayah Papua, separatisme juga mengancam demokrasi Indonesia. Pada awalnya, OPM tidak memperoleh pendapatan dari aset yang sedang berlangsung di daerah itu. Tetapi, seiring berjalannya waktu pola ini mulai berubah. Contohnya di daerah Paniai, OPM mulai mendirikan pos pemeriksaan dan memungut pajak untuk proyek maupun bisnis pemerintah. Di daerah lain seperti Jayawijaya, Lanny Jaya, Paniai, dan Puncak Jaya, usaha pertambangan dan agribisnisnya dipaksa untuk membayar pejabat OPM setempat. Meskipun konflik antar pemerintah dan kelompok separatis bukan penyebab sumber kematian terbesar di Papua, tapi hal ini tetap menjadi salah satu sumber ketidakamanan wilayah Papua (Anderson B. , 2015, pp. 24-37).

Dari buku diatas penulis dapat mengetahui sebab-sebab Papua menjadi daerah yang tidak aman. Banyak provokasi yang terjadi Papua dan meresahkan masyarakat, bukan hanya penduduk lokal yang merasa diresahkan dan terancam

dengan adanya faktor tersebut, tetapi hal ini juga mempengaruhi kestabilan negara. Buku di atas juga hanya berfokus pada masalah-masalah yang muncul di Papua, kurang menjelaskan aktor internasional yang terlibat.

Adapun jurnal yang ditulis oleh Simon menjelaskan bagaimana media sosial sangat berpengaruh besar dalam mencari simpati dari Negara maupun aktivis-aktivis HAM di luar Indonesia. Dengan adanya sosial media para kelompok separatis dengan sangat mudah mengekspos kekerasan dan konflik yang terjadi di wilayah Papua demi menarik simpatisan. Diketahui juga bahwa dalam menangani kelompok separatisme pemerintahan pada masa orde baru lebih banyak melakukan kekerasan, tidak hanya pada separatis Papua tetapi terjadi juga pada separatis Timor Timur, Aceh, dan Maluku. Pada saat itu media sangat dibatasi oleh pemerintah sehingga informasi yang diterima oleh masyarakat sekitar sangat sulit didapat. Pemerintah pada saat itu juga memblokir wartawan asing, organisasi non-pemerintah, dan akademisi untuk dapat mengakses dan mengetahui kondisi Papua pada saat itu. Namun, hal tersebut berubah seiring zaman, para aktivis kemerdekaan sekarang dapat membingkai suatu konflik dan mempostingnya di media sosial sehingga dapat dengan mudah tersebar dan dilihat oleh publik. Dengan meningkatnya teknologi dan cepatnya berita tersebar membuat pemerintah lebih sulit untuk mengendalikan informasi yang tersebar (Phillpot, 2018, pp. 260-266). Adanya media yang dapat mempermudah untuk mengakses segala informasi yang ada dimanfaat dengan baik oleh Benny Wenda untuk menyebarkan informasi dan membentuk opini baru.

Dalam jurnal tersebut penulis dapat melihat konflik antar pemerintah Indonesia yang berusaha untuk menutupi konflik yang terjadi di tanah Papua

dengan cara memblokir jurnal asing maupun memberi batasan akses internet agar berita tidak dapat tersebar dengan aktivis kemerdekaan Papua yang ingin menarik simpatisan masyarakat internasional dengan menggunakan media sosial. Dengan adanya sosial media, para aktivis ini dapat memperlihatkan pada publik apa yang sebenarnya terjadi pada Papua.

Pada jurnal lain, adapun yang membahas aktivitas kelompok separatis di Internasional juga ditulis oleh Nainggolan. Dalam pembahasannya ini, Nainggolan menjabarkan usaha-usaha yang dilakukan oleh kelompok separatisme ini. Jika pada jurnal sebelumnya disebutkan bahwa kelompok separatisme ini menggunakan sosial media guna mencari simpati masyarakat Internasional, di jurnal ini menjabarkan aktivitas-aktivitas yang dilakukan seorang Benny Wenda untuk mendapat dukungan dari negara-negara lain melalui jalur diplomasi. Selain itu Benny dan kelompok separatis lainnya juga mendirikan kantor-kantor sekretariat di luar negeri. Adanya kantor di negara lain memberi manfaat bagi kelompok separatis ini untuk memperjuangkan aspirasi dari kepentingan mereka. Kelompok separatis ini menggunakan diplomasi internasional untuk mendapatkan teman dan simpati, yang dapat memperluas dukungan politik. Karena kita ketahui bersama bahwa dukungan dan pengakuan dari negara lain termasuk aspek yang penting untuk memperoleh kemerdekaan (Nainggolan, 2014, pp. 188-196).

Salah satu sub-bab dari buku *Civil Resistance and Conflict Transformation* yang ditulis oleh Jason Macleod menjabarkan sejarah masa lampau Papua dan yang telah terjadi sampai saat ini. Tidak rinci tapi menjelaskan perubahan pemerintah Indonesia dalam mengontrol wilayah Papua dari kekerasan sampai berkurangnya penggunaan senjata. Dari tulisan Jason juga menyebutkan kelompok-kelompok

yang terbentuk dari organisasi lokal hingga organisasi internasional yang dibentuk oleh beberapa kelompok untuk memperkuat argumen dan kepentingan yang ingin mereka capai, yaitu kebebasan untuk menentukan nasib sendiri.

Disebutkan juga dalam sub-bab di buku ini Benny Wenda turut serta membentuk *International Parliamentarians for West Papua* (IPWP) dan *International Lawyers for West Papua* (ILWP). Kedua organisasi tersebut didukung anggota parlemen, pengacara dengan adanya kantor-kantor Gerakan Papua Merdeka yang tersebar di beberapa negara yang mendukung pembebasan Papua dari Indonesia.

Meski tidak dijelaskan secara gamblang bagaimana organisasi maupun kelompok-kelompok ini bekerja atau berkegiatan, namun cukup membantu penulis untuk menganalisis organisasi yang terlibat dalam pembebasan Papua.

1.7 Landasan konseptual

Pada penelitian ini penulis akan menggunakan konsep *Transnational Advocacy Network* oleh Margareth Keck dan Kathryn Sikkink untuk menganalisis upaya separatisme yang dilakukan oleh Benny Wenda.

Pada akhir abad 20, dunia politik melibatkan aktor non-negara yang berinteraksi satu sama lain, baik dengan negara atau dengan organisasi internasional dan interaksi tersebut terstruktur di dalam sebuah jaringan. Dalam interaksi ini, salah satu aktor yang menonjol adalah jaringan advokasi internasional. Jaringan ini memiliki signifikansi transnasional, regional, maupun domestik, yang melibatkan para ahli, ilmuwan, dan aktivis. Jaringan advokasi inernasional berfungsi sebagai kekuatan pendorong proses integrasi regional dan internasional dengan membangun hubungan antara aktor masyarakat sipil, negara, dan organisasi

internasional dengan cara berdialog dan bertukar pikiran. Di dalam kerangka kerja jaringan advokasi transnasional terdapat ide, norma, dan diskursus dalam perdebatan sehingga menghasilkan informasi. Selain itu, aktor dari TAN juga bekerja sebagai penekan aktor yang membuat kebijakan. Inti dari hubungan ini adalah pertukaran informasi, dengan adanya jaringan ini dapat melihat kemampuan aktor internasional non-tradisional untuk memobilisasi informasi secara strategis dalam membangun isu, untuk membujuk, menekan, dan mendapatkan pengaruh yang lebih besar dari organisasi dan pemerintah.

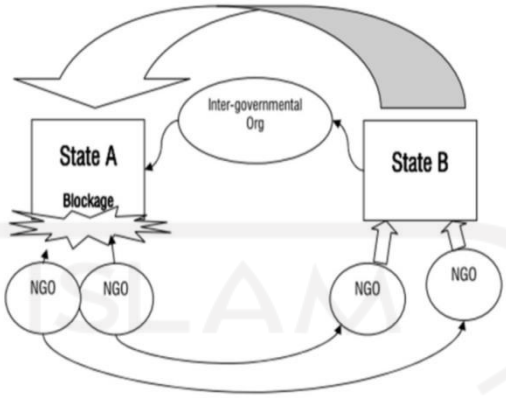
Konsep dari jaringan advokasi transnasional ini karena advokat memperjuangkan orang lain atau suatu tujuan tertentu. Jaringan transnasional terorganisir untuk memprioritaskan suatu penyebab, ide, dan norma prinsip. Biasanya isu yang sering diangkat oleh aktor TAN yaitu tentang hak asasi manusia, lingkungan, perempuan, kesehatan bayi, dan masyarakat adat. Keck dan Sikkink mengklasifikasikan tujuh aktor dalam jaringan ini, diantaranya; (1) adalah organisasi non-pemerintah domestik maupun internasional serta lembaga riset dan advokasi, (2) gerakan lokal sosial, (3) yayasan, (4) media, (5) lembaga keagamaan, perdagangan, intelektual, (6) bagian dari organisasi pemerintah, (7) bagian dari ekskutif atau parlemen. TAN sendiri paling muncul di sekitar isu-isu dimana hubungan antara kelompok lokal dengan pemerintah terhambat atau terputus sehingga membuat konflik tidak dapat diselesaikan, dengan begitu dapat menggerakan pola boomerang pada jaringan ini. Selain itu, aktivis atau pengusaha politik percaya dengan adanya jaringan ini maka akan memudahkan tujuan dan kampanye mereka dan secara aktif mempromosikannya. Faktor lainnya yaitu, adanya konferensi internasional yang dapat menguatkan jaringan.

Dalam studi kasus ini, konflik yang terjadi di Papua Barat dan Pemerintah Indonesia tidak kunjung mendapatkan pencerahan yang pada akhirnya memunculkan kelompok seperatisme yang salah satu aktornya yaitu Benny Wenda. Namun, Benny Wenda ini tidak memiliki akses langsung ke Pemerintah Indonesia karena pihak Pemerintah tidak menginginkan adanya perundingan dan melakukan referendum ulang untuk Papua Barat, sehingga ia kini mencari dukungan internasional dengan menggunakan media informasi maupun media sosial yang dimiliki guna membantu memberi tekanan pada Pemerintah Indonesia.

Penulis di sini melihat Benny Wenda sebagai aktivis atau *political entrepreunership* yang membuat jaringan advokasi seperti ULMWP, IPWP, ILWP, dan FWPC. Jaringan yang dibentuk oleh Benny Wenda memiliki tujuan masing-masing yang dapat menunjang kampanye kemerdekaan Papua Barat yang diusungnya. Benny Wenda sebagai aktivis berperan cukup aktif untuk menggalang dukungan internasional dan mencari perhatian sehingga masyarakat internasional sadar dan mengetahui konflik yang terjadi di Papua Barat.

Pemerintah adalah "penjamin" dari hak-hak tetapi pemerintah juga sebagai pihak yang melakukan pelanggaran. Disaat pemerintah melakukan pelanggaran hak asasi dan tidak memberikan hak-hak yang harus diberikan, maka baik individu maupun organisasi lokal tidak memiliki akses untuk masuk ke dalam politik atau ke dalam peradilan. Dengan begitu, untuk melindungi hak-hak tersebut maka aktor TAN akan mencari koneksi internasional untuk membantu dan memberi tekanan pada negara dari luar. Inilah yang disebut oleh Keck dan Sikkink sebagai *Boomerang Pattern*.

Gambar 1. 1 Boomerang Pattern



Sumber: Keck & Sikkink, Activist Beyond Border: Advocacy Networks in International Politics

TAN memerlukan untuk mencari pengaruh yang cukup kuat untuk melakukan tekanan pada pihak lain dengan menggunakan informasi, ide, dan strategi yang mereka miliki sehingga akan mencapai sebuah kebijakan. Setidaknya terdapat empat macam tipologi yaitu;

1. *Information politics*, atau kemampuan untuk memanfaatkan informasi politik secara cepat dan kredibel ke tempat yang akan mendapatkan pengaruh yang besar.
2. *Symbolic politics*, atau kemampuan untuk menggunakan simbol-simbol, aksi atau cerita yang dapat menggambarkan situasi yang ada, dan membawaya ke masyarakat yang lebih luas.
3. *Leverage politics*, untuk mendapatkan bantuan dari aktor yang memiliki kekuasaan agar dapat memberikan dampak, sehingga mampu memperkuat jaringan transnasional yang hanya memiliki pengaruh kecil.
4. *Accountability politics*, atau upaya untuk menahan aktor-aktor yang berkuasa agar tetap pada kebijakan atau prinsip yang telah dinyatakan sebelumnya.

Dari keempat taktik politik di atas digunakan untuk menganalisis proses advokasi dan strategi apa saja yang telah digunakan oleh Benny Wenda untuk mencapai tujuannya baik dalam hal membentuk opini publik, maupun untuk memperjuangkan kemerdekaan Papua Barat. Jika dilihat dari keempat penjelasan strategi, Benny Wenda melakukan *Information Politics, Symbolic Politics, dan Leverage Politics* untuk membentuk opini dan mendapatkan dukungan dari aktor negara maupun aktor non-negara yang lainnya (Keck & Sikkink, 1999, p. 95). Sedangkan pada *Accounability Politics*, Benny Wenda belum dapat melakukan strategi ini dikarenakan belum ada perubahan kebijakan dari Pemerintah Indonesia mengenai isu kemerdekaan Papua Barat.

Untuk melihat pengaruh dari upaya yang telah dilakukan oleh aktor TAN, Keck dan Sinkink mengidentifikasi terdapat lima level, yaitu; (1) pembuatan isu dan mengatur agenda, (2) mempengaruhi posisi dirskursif negara dan organisasi regional maupun internasional, (3) mempengaruhi prosedur kelembagaan, (4) mempengaruhi kebijakan yang dibuat oleh target aktor, bisa sebuah negara atau organisasi regional dan internasional, (5) mempengaruhi perilaku negara (Keck & Sikkink, 1999).

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan penulis dalam skripsi ini adalah metode kualitatif. Dalam metode penelitian kualitatif ini informasi didapatkan dari aktor, aktivitas, dan tempat yang dijadikan subjek dari penelitian tersebut. Data penelitian kualitatif didapatkan dari informasi yang telah diamati, didengar, dirasa, dan dipikirkan oleh penulis terkait dengan penelitiannya. Dalam penjabaran

maupun data penelitiannya metode penelitian kualitatif bersifat deskriptif, dinamis dan berkembang, dan memiliki subjek yang terbatas (Idrus, 2009, pp. 23-27). Berikutnya, analisa akan dilakukan dengan menggunakan data-data yang telah didapatkan dan akan dibandingkan dengan kajian pustaka yang ada.

1.8.2 Subyek Penelitian

Subyek penelitian dalam skripsi ini adalah kelompok separatisme Papua, dimana penulis ingin melakukan analisis faktor yang melatarbelakangi keinginan kelompok ini untuk memisahkan diri dari Indonesia. Tidak hanya itu, penulis juga akan melihat respon dari pemerintah Indonesia dengan mengakarnya isu separatisme ini di kancah internasional yang dapat mengancam integrasi nasional.

1.8.3 Alat Pengumpul Data

Pada pengumpulan data kualitatif ini penulis akan mengumpulkan data dari berbagai sumber, diantaranya bersumber dari buku, jurnal ilmiah, surat kabar *online*, situs pemerintah, situs resmi Benny Wenda, dan sumber kredibel lainnya.

1.8.4 Proses Penelitian

Setelah data terkumpul, pada tahap ini penulis akan menganalisis lebih lanjut dan dijabarkan dengan menggunakan kerangka konseptual untuk menjawab permasalahan. Dalam menjawab pertanyaan masalah kelompok separatisme yang ingin memisahkan diri dan mencari dukungan dari aktor internasional, penulis akan menggunakan teori pemisahan diri yang melihat dari empat faktor yaitu ekonomi, budaya, politik, dan faktor pendukung lainnya. Setelah melakukan analisa terkait permasalahan akan ditemukan hasil analisa terkait isu separatisme Papua.

BAB 2

FAKTOR PEMICU YANG MEMENGARUHI BENNY WENDA DALAM UPAYA SEPARATISME PAPUA BARAT

Konflik yang terjadi antara Masyarakat Papua dan Pemerintah Indonesia yang tidak kunjung usai menjadi satu isu penting di dalam negeri maupun luar negeri. Penyebab dari konflik yang tidak pernah menemukan titik terang ini adalah isu kepercayaan masyarakat Papua pada pemerintah yang dirasa tidak adil dan merasa "dijajah" oleh Indonesia. Oleh karena itu masyarakat Papua menginginkan kebebasan dalam menentukan nasibnya sendiri.

Dalam konsep Keck dan Sikkink telah dijelaskan, bahwa dalam melihat upaya sebuah jaringan advokasi maka perlu untuk menidentifikasi karakteristik dari aktor tersebut. Untuk menvalidasi Benny Wenda faktor dari munculnya jaringan advokasi yang telah dijabarkan oleh pada konsep TAN, dengan begitu pada bab ini penulis akan menjabarkan konflik yang terjadi di Papua dan apa yang menjadikan Benny Wenda sebagai salah satu aktivis pro kemerdekaan Papua Barat.

Aktivisme yang dilakukan oleh Benny Wenda dapat diidentifikasi sebagai bagian dari aktor TAN. TAN merupakan jaringan memiliki signifikansi transnasional, regional, maupun domestik, yang melibatkan para ahli, ilmuwan, dan aktivis. Jaringan advokasi inernasional berfungsi sebagai kekuatan pendorong proses integrasi regional dan internasional dengan membangun hubungan antara aktor masyarakat sipil, negara, dan organisasi internasional dengan cara berdialog dan bertukar pikiran. Terdapat tiga faktor pendorong kemunculan TAN yaitu;

boomerang pattern, political entrepreuners, international organization dan *conference* (Keck & Sikkink, 1999, p. 93).

2.1 Boomerang Pattern Yang Terjadi Akibat Adanya Konflik di Papua

Dalam setiap konflik pasti ada sumber yang menyebabkan masalah itu terjadi, dalam kasus antara Papua Barat dan Pemerintah Indonesia setidaknya ada empat sumber. Diantaranya yaitu masalah sejarah dan proses integrasi Papua ke Indonesia, masalah operasi militer dan adanya pelanggaran HAM yang terjadi akibat operasi militer itu sendiri, munculnya stigma di masyarakat Papua sebagai orang yang termarjinalisasikan, dan yang terakhir karena kegagalan pembangunan (Widjojo M. S., 2011).

2.1.1 Sejarah Integrasi Papua ke Dalam Wilayah Indonesia

Masalah utama yang memicu konflik antara Rakyat Papua dan Pemerintah Indonesia ada dua yaitu sejarah masa lalu saat penjajahan Belanda, apakah Papua dianggap sebagai entitas yang berbeda atau sebagai bagian dari Hindia Belanda sebelum berubah menjadi Indonesia, karena adanya perbedaan budaya dan ras antara orang asli Papua dengan mayoritas orang Indonesia.

Dalam usaha mempertahankan kendalinya atas Papua, Belanda mengusulkan melalui banyak konferensi dengan mengusulkan konsep negara federal pada Indonesia dan mengusulkan untuk tidak memasukkan kawasan Papua dalam bagian NKRI. Tetapi usulan tersebut ditolak, dengan begitu penolakan tersebut menjadi bukti nasionalisme orang Indonesia terhadap Papua (Viartasiwi, 2018, pp. 1-9).

Masalah kedua yaitu sejarah referendum 1969 atau yang lebih dikenal dengan Act of Free Choice (AFC). AFC direkomendasikan oleh PBB berdasarkan

kesepakatan Belanda dan Indonesia pada saat itu untuk menentukan nasib Papua melalui Perjanjian New York 1962. Orang Papua merasa perjanjian itu ilegal karena hanya melibatkan beberapa perwakilan saja. Jadi, Orang Papua belum merasa bahwa prosesnya sudah sesuai (Anderson K. , 2015, pp. 11-13).

Sebelum terjadinya pemilihan tersebut sebenarnya penduduk asli Papua sudah memulai perlawanan dan terbentuk Gerakan Papua Merdeka yang lebih sering dikenal dengan Organisasi Papua Merdeka pada tahun 1965. Perjuangan mereka dimulai sejak itu hingga saat ini dan mulai mencari dukungan internasional (Antonopoulos & Cottle, 2019, pp. 160-163).

2.1.2 Operasi Militer dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Papua

Dibawah pemerintahan Indonesia, penduduk asli Papua telah mengalami banyak pelanggaran HAM yang sistematis dan meluas seperti penyiksaan, pembunuhan, kerja paksa, pemindahan paksa, pemerkosaan, dan bahkan penghilangan paksa (Anderson K. , 2015, p. 13). Sepanjang 6 tahun pemerintahan formal Indonesia sampai referendum yang telah ditetapkan, Indonesia mulai memperkuat cengkramannya di Papua, bahkan orang-orang Papua yang mendukng maupun netral terhadap pemerintah Indonesia mulai berpikir untuk melakukan perlawanan. Pendekatan militer oleh Indonesia mengakibatkan banyaknya kematian dari warga sipil, pengungsi, dan meningkatnya kebencian.

Peristiwa yang paling menonjol dimana terdapat ratusan bahkan ribuan orang diperkirakan tewas dalam setiap serangan yang terjadi diantaranya yaitu peristiwa Manokwari, 12 Maret 1967 terjadi serangan udara dan pemboman yang diperkirakan menewaskan 200-3500 orang. Akhir tahun 1981, di Danau Wissel, Paniai, terjadi pemboman hebat di desa-desa dan diduga menewaskan sampai

13.000 orang dan pada tahun 1984 terjadi penembakan laut dan udara di sekitar Pegunungan Cyclops dan menewaskan 200 orang. Ketiga peristiwa tersebut menggambarkan peristiwa paling umum sepanjang rezim orde baru (Cann, 2011).

2.1.3 Marjinalisasi Orang Papua

Masalah lain yang dihadapi oleh orang Papua selain proses integrasi yang tidak sesuai prosedur dan banyaknya pelanggaran HAM yang terjadi yaitu persoalan identitas, status politik dan marginalisasi orang Papua. Orang Papua merasa termarjinalkan di daerahnya sendiri juga dari Indonesia, baik secara ekonomi maupun poltik. Mereka merasa tidak adanya keadilan bagi warga Papua. Pemerintah juga melakukan transmigrasi secara massa dan pada akhirnya orang-orang non-Papua menjadi mayoritas. Sebagian masyarakat non-Papua ini tinggal di daerah perkotaan dan menjadi mayoritas, sebaliknya di daerah pedesaan mayoritasnya masih orang-orang Papua. Tetapi orang non-Papua lebih mendominasi kegiatan ekonomi dan pekerjaan formal, ketidakseimbangan ini memicu konflik dan menandakan diskriminasi terhadap orang Papua. Di daerah pedesaan pun masih terjadi operasi militer yang berlangsung untuk melawan anggota separatis (Hernawan, Elmslie, & Pas, 2015).

Sebelum Indonesia mengambil alih Papua, pemerintah Indonesia secara sistematis mencoba untuk memalsukan identitas sebagai orang Indonesia, bukan orang Melanesia. Proses akulturasi ini bertujuan untuk memasukkan orang Papua ke dalam konsep negara bangsa Indonesia melalui sistem pendidikan, media, pembangunan ekonomi, dan transmigrasi. Proses Indonesiasi ini didasarkan pada anggapan bahwa orang Jawa lebih maju dan "beradab", dan karenanya pada akhirnya akan memperkuat persatuan nasional dan kemungkinan eksploitasi

sumber daya alam yang lebih besar. Imperialisme budaya menyebabkan hilangnya identitas budaya Papua secara bertahap melalui Indonesiasi semua lembaga pemerintah Indonesia, budaya dan pendidikan di Indonesia. Salah satunya adalah operasi Koteka pada tahun 1971.

Operasi Koteka adalah proyek pengembangan masyarakat yang bertujuan untuk mengubah cara hidup orang Papua yang tinggal di dataran tinggi. Rencananya adalah membujuk mereka untuk meninggalkan koteka dan mulai mengenakan pakaian. Namun dari sudut pandang orang Papua, operasi Koteka dianggap sebagai penghinaan (Gietzelt, 1989).

2.1.4 Terlambatnya Pembangunan Di Papua

Selama Orde Baru, Soeharto hanya terfokus pada perkembangan ekonomi di Indonesia bagian barat dan kurang memperhatikan pembangunan ekonomi bagian timur. Hal inilah yang mengakibatkan distribusi pembangunan ekonomi tidak merata. Pada akhirnya, saat Soeharto sadar akan pentingnya investor asing, ia lalu membuat kebijakan yang mendorong investor asing untuk berinvestasi. Pada tahun 1967, sebuah perjanjian ditandatangani dengan Freeport, sebuah perusahaan pertambangan di Amerika Serikat, yang sebenarnya tidak membawa keuntungan, tetapi lebih banyak kerugian. Pengembangan sumber daya lainnya oleh perusahaan internasional lainnya termasuk pertambangan, minyak, gas alam, lautan, dan kehutanan, tetapi Freeport masih memainkan peran penting selama periode Suharto.

Dengan degradasi lahan, distribusi kekayaan yang tidak merata yang dibawa oleh pengembangan sumber daya alam telah mendorong keinginan orang Papua untuk menentukan nasibnya sendiri. Selain itu, penambangan yang dilakukan juga menimbulkan kerusakan lingkungan yang sangat besar. Perusahaan pertambangan

Freeport membuang jutaan ton limbah dalam bentuk logam dan arsenik, yang mencemari hutan dan sungai, mengancam spesies yang terancam punah dan menghancurkan lahan yang menyediakan makanan dan mata pencaharian bagi penduduk setempat (Druce, 2020, pp. 90-102).

Tidak hanya itu, tetapi masalah pendidikan, kesehatan, dan ekonomi di Papua masih tertinggal daripada daerah lain di Indonesia. Kurangnya fasilitas yang memadai menjadi kendala utama bagi sektor-sektor tersebut untuk berkembang (Mollet, 2011, pp. 237-240). Dengan terhambatnya fasilitas yang ada sdm pun juga akan ikut terhambat sehingga menimbulkan kesenjangan dan rendahnya daya saing dengan orang-orang yag berimigrasi ke Papua.

Dengan adanya empat konflik utama ini, melahirkan individu maupun kelompok-kelompok yang menginginkan adanya pembebasan Papua Barat dari Indonesia karena masalah-masalah ini yang tak kunjung diselesaikan oleh Pemerintah Indonesia dan tidak ada komunikasi yang terbangun antara kelompok sosial dan pemerintah. Kelompok atau individu inilah yang pada akhirnya membangun koneksi internasional yang bertujuan untuk menekan Pemerintah Indonesia. Salah satu aktor individu pro kemerdekaan yang menonjol di level internasional yaitu, Benny Wenda, yang misi utamanya sampai saat ini yaitu memperjuangkan kemerdekaan Papua Barat dan saat ini telah mengumpulkan dukungan-dukungan internasional guna mendorong atau menekan Pemerintah Indonesia agar melakukan referendum kembali atas Papua Barat serta menyelesaikan kasus pelanggaran HAM yang telah terjadi.

2.2 Benny Wenda Sebagai Political Entreupreuners

Keck dan Sinkking menyebutkan bahwa seorang aktivis percaya bahwa dengan memperluas jaringan maka akan memudahkan pula bagi mereka untuk melakukan misi dan kampanye-kampanye. Dalam penjabarannya, aktivis disebutkan sebagai seorang yang sangat peduli terhadap suatu isu yang bahkan mereka bersiap untuk memikul beban biaya dan melakukan aksi-aksi untuk mencapai tujuan mereka. Tidak hanya itu, untuk memperluas jaringannya maka aktivis akan membentuk jaringan-jaringan lain yang ia yakini akan memajukan misi, dengan berbagi informasi, mencapai visibilitas yang lebih besar, mendapatkan akses ke publik yang berbeda, dan melipat gandakan saluran agar mendapat akses institusional (Keck & Sikkink, 1999, p. 93).

Latar belakang dari seorang Benny Wenda seorang aktivis Papua Merdeka tidak dapat diabaikan, karena dari latar belakangnya akan terlihat apa yang mempengaruhi seorang Benny dalam bertindak dan cara berpikirnya. Dengan sedikit menelisik ke riwayat hidup yang dialami Benny Wenda akan diketahui faktor-faktor Benny dalam gerakannya untuk menciptakan perdamaian di Tanah Papua.

Benny Wenda lahir di dataran tinggi Papua Barat pada tahun 1974 dan tinggal dengan keluarganya di kawasan Pirime, Lanny Jaya. Tidak lama setelah Benny lahir, Indonesia meluncurkan operasi militer di Dataran Tinggi Papua sebagai tanggapan akibat adanya pemberontakan saat pemilihan umum 1977. Pada tahun 1977 dan 1978 itu terjadi kebrutalan dan penindasan di kawasan tempat tinggalnya secara besar-besaran. Sejak saat itu keluarga Benny dan para tetangganya tinggal di hutan mulai dari tahun 1977-1983 untuk bersembunyi.

Akibat dari operasi militer itu pula kedua orang tua Benny meninggal karena tidak mendapat pertolongan medis dan pada akhirnya Benny tinggal dengan pamannya. Setelah itu ia dibawa ke Jayapura untuk melanjutkan studi dan bertujuan untuk memulihkan pikirannya tapi tak disangka Benny menjadi korban bully dari teman-temannya yang merupakan pendatang dari luar Papua karena melihat seorang Papua sebagai primitif dan kotor.

Setelah melewati masa sekolahnya yang berat Benny Wenda melanjutkan studinya di Universitas Cendrawasih sebagai mahasiswa jurusan Sosiologi, dari sinilah Benny mempelajari sejarah Papua Barat untuk mengenali identitasnya. Saat menjadi mahasiswa Benny sering membentuk kelompok diskusi bersama mahasiswa Papua lainnya dengan tujuan untuk mengubah pola pikir mereka jika Papua itu tidak primitif, bodoh, dan kotor seperti kebanyakan orang bilang. Ia menanamkan pada mahasiswa untuk bangga dengan identitasnya sendiri.

Inilah titik mula seorang Benny Wenda menjadi seorang aktivis. Sebagai seorang aktivis Papua ia memiliki dua tujuan. Yaitu, ia ingin membawa perdamaian bagi rakyat Papua Barat dan ingin memerdekakan Papua Barat. Saat ditemui media asing dan diwawancara Benny menyatakan akan melakukan kampanye secara damai untuk menarik empati lebih banyak orang dan juga ia berpikir bahwa kemampuan militer Papua tidak sepadan jika harus dilakukan dengan kekerasan.

Pada saat orde baru digulingkan tahun 1998, Benny merasa ada peluang terbuka untuk memerdekakan Papua. Hal itu didukung oleh naiknya Presiden keempat yaitu Abdurrahman Wahid yang sering dikenal dengan Gus Dur. Gus Dur dinilai lebih memiliki nilai toleransi yang tinggi daripada pendahulunya. Dalam masa kepemimpinannya orang Papua dengan pertama kali dapat bebas

mengibarkan bendera Bintang Kejora, sebagai simbol identitas politik mereka. Tetapi hal itu hanya bertahan untuk sementara karena Gus Dur lengser dan digantikan oleh Megawati yang pada akhirnya menegaskan kembali kedaulatan Indonesia dan menindak gerakan separatis.

Benny mendapat tuduhan menjadi penghasut atas serangan yang terjadi di Abepura dan ditangkap pada tahun 2000 dan rumahnya digeledah tanpa adanya surat perintah. Saat berada di penjara Benny mendapat perlakuan tidak baik dari penjaga penjara dan mendapat ancaman dari kepala penjara. Atas saran dari pengacaranya, Benny kabur dari penjara pada tahun 2002 dengan bantuan LSM Eropa dan melakukan perjalanan ke Inggris dimana ia mendapatkan suaka politik. Sejak saat itu Benny menjadi buronan Pemerintah Indonesia, bahkan pemerintah juga mengeluarkan surat penangkapan internasional melalui Interpol tahun 2011 tetapi surat perintah itu dicabut pada tahun 2012 setelah naik banding. Sejak diberikan status pengungsi di Oxford, Inggris, Benny memulai usahanya untuk menyampaikan kampanye kemerdekaan untuk Papua Barat (Firdaus, Tjin, & Ilman, 2020). Atas dorongan-dorongan yang ada, Benny Wenda yang saat ini telah menjadi WNA di Inggris, menggunakan isu Papua Barat untuk menarik dunia internasional dan membentuk jaringan advokasi, sehingga memudahkannya dan menjadi kan jaringan advokasi tersebut sebagai wadah dari para pendukung kemerdekaan Papua Barat. Benny Wenda cenderung aktif dalam menyuarakan pendapatnya di dunia internasional tentang bagaimana Indonesia “menjajah” Papua dan menginginkan kemerdekaan untuk tanah kelahirannya tersebut.

2.2.1 Jaringan Yang Dibentuk Oleh Benny Wenda

Setelah mendapat suaka di Oxford, Inggris, Benny berusaha untuk tetap aktif dalam memperjuangkan kemerdekaan Papua Barat. Hal ini terlihat dari terbentuknya jaringan yang ia bentuk untuk Papua merdeka dan mulai banyaknya dukungan-dukungan dari aktor internasional.

Benny mulai menggerakkan Kampanye Papua Barat Merdeka untuk menyebarkan kesadaran adanya pelanggaran HAM di Papua Barat dan mencari penentuan nasib sendiri bagi rakyat Papua. Ia dan keluarganya sering berpindah dan berpergian ke wilayah Inggris dan Eropa untuk menceritakan kisahnya pada orang-orang, sehingga dapat mengambil simpati mereka yang pada akhirnya dukungan pun mulai tumbuh perlahan, baik dari Inggris maupun dari wilayah lain. Kampanye Papua Barat Merdeka ini bahkan memiliki pendukung di Eropa, Amerika Serikat, Kepulauan Pasifik, Filipina, dan Afrika, yang dibangun dari kerjasama beberapa orang Papua yang diasingkan dan sekutunya.

Gerakan kemerdekaan untuk Papua pertama kalinya bersatu sejak 2014 di bawah *United Liberation Movement for West Papua* yang diketuai oleh Benny Wenda. Benny dan aktivis pro-kemerdekaan Papua yang lainnya menyatukan tiga organisasi politik utama yaitu Republik Federal Papua Barat (NRFPB), Koalisi Nasional Papua Barat untuk Pembebasan (WPNCL) dan Parlemen Nasional Papua Barat (NPWP) di bawah satu naungan. Benny menyatakan bahwa organisasi ini memiliki lawan yang sama, yaitu Indonesia, jadi ia ingin menunjukkan kepada pemerintah dan pihak luar bahwa mereka dapat bersatu dan menginginkan referendum secara damai (Ligo, 2014).

Beberapa diantara jaringan yang dibentuk oleh Benny Wenda, antara lain:

1. *United Liberation Movement for West Papua*

Pergerakan perlawanan yang semakin terkonsolidasi ditandai dengan pembentukan *United Liberation Movement for West Papua* (ULMWP) yang menyatukan kelompok perjuangan bersenjata dan faksi politik. Dengan dibentuknya ULMWP secara tidak langsung pergerakan kemerdekaan Papua lebih terkoordinasi untuk meraih dukungan politik dari masyarakat internasional, baik dari personal maupun kelompok seperti negara dan organisasi non pemerintah. ULMWP dideklarasikan pada 7 desember 2014 di Port Vila, Republik Vanuatu. Yang pada saat ini, Benny Wenda tercata sebagai ketua dari ULMWP, dan menjadi Presiden Sementara atas Papua Barat.

Tujuan dari ULMWP sebagian besar berfokus pada pelobian kelompok internasional dan pemerintah untuk mencari dukungan bagi perjuangan kemerdekaan Papua Barat (Ligo, 2014). Sedangkan tugas ULMWP untuk mengampanyekan Papua Merdeka serta melakukan lobi-lobi politik untuk mendapatkan dukungan dari berbagai negara, terutama di kawasan Pasifik Selatan.

2. *International Parliamentarians for West Papua* (IPWP)

Pada 15 Oktober 2008 diselenggarakan rendezvous lebih kurang 30 aktivis Papua Merdeka dan beberapa anggota parlemen (2 berasal Inggris serta masing-masing satu asal Vanuatu dan Papua Nugini). rendezvous ini menghasilkan forum yang diklaim sebagai International Parliamentarians for West Papua (IPWP). Nampaknya, para aktivis penyelenggara pertemuan tersebut mencoba mengulang

kesuksesan International Parliamentarians for East Timor (IPET) yang sukses mendorong kemerdekaan Timor Leste (Widjojo M. S., 2009)

Tujuan utama kelompok IPWP, yang berhasil diluncurkan di Parlemen Inggris 2008 lalu, meliputi;

a. Melobi untuk aksi baru dalam penentuan nasib sendiri yang sesuai dengan hukum internasional di mana penduduk asli Papua Barat berhak dan diizinkan untuk memutuskan status mereka
b. Menyerukan serta mendukung penarikan segera pasukan Indonesia dari Papua Barat
c. Memanggil pasukan penjaga perdamaian internasional untuk Papua Barat di bawah otoritas PBB
d. Memohon pada pemerintah Inggris untuk menghentikan seluruh penjualan senjata ke Indonesia sehingga tentara perbatasan Indonesia di Papua Barat digantikan oleh tentara penjaga perdamaian

   (IPWP, 2010)

3. *International Lawyers for West Papua* (ILWP)

Pengacara internasional untuk Papua Barat (ILWP) adalah jaringan profesional hukum yang bekerja pada hak-hak Papua Barat untuk kemerdekaan, serta memperkuat dan melestarikan hak asasi manusia lainnya. ILWP membantu orang-orang asli Papua Barat untuk menggunakan hak-hak mereka (ILWP, 2014)

Ada tiga tujuan utama dibentuknya ILWP ini, yaitu:

a. *General Counsel*

Kami memberikan nasihat hukum kepada Gerakan Pembebasan United untuk Papua Barat (ULMWP), organisasi kemerdekaan memimpin Gerakan, dan pemimpin mereka Benny Wenda. ILWP secara langsung membantu upaya bilateral dan multilateral oleh ULMWP, terutama dengan delegasi negara di Jenewa dan New York.

b. *Legal Action*

Berfungsi menyelidiki, mengembangkan strategi dan bertindak di tingkat lokal, regional dan internasional. Kami melakukan pengajuan ke PBB, mengajukan pengakuan untuk Papua Barat di Badan Internasional dan Regional, dan menyarankan negara-negara tentang bagaimana cara untuk memberi dukungan.

c. Advokasi publik

Indonesia sering memandang rendah hukum internasional. Saat hal itu terjadi, ILWP merespon arena publik, melalui artikel pers, wawancara dan media sosial. Untuk melakukannya, kami mengadakan penelitian hukum dan praktik.

4. *Free West Papua Campaign*

Free West Papua Campaign (FWPC) dibentuk pada tahun 2004 silam di Oxford, Inggris, dan kampanye ini dipimpin oleh Benny Wenda selaku pemimpin dari ULMWP.

FWPC dibuat untuk mencapai kemerdekaan di Papua Barat dengan metode damai. FWPC digunakan untuk mendorong kelompok solidaritas dan pendukung yang ada di seluruh dunia untuk berfokus pada masalah kebebasan

Papua Barat. Misi yang dimiliki oleh FWPC ini adalah menargetkan kelompok lokal, kelompok gereja, jurnalis, pengacara, politisi, orang-orang penting, olahragawan, penghibur, dan organisasi masyarakat sipil.

Dalam mengkampanyekan kemerdekaan Papua Barat FWPC menggunakan petisi, demonstrasi, protes, konferesi, konser musik, pemutaran film, media sosial, artikel untuk menciptakan kesadaran sosial dan menggiring opini publik dan menginformasikannya secara global. Saat ini, FWPC selain di Oxford, sudah memiliki kantor yang berada di enam negara, yaitu di PNG, Polandia, Selandia Baru, Belanda, Perth, dan Kenya (FWPC, About the Campaign, 2004).

Penjabaran pada bab dua ini telah menjelaskan faktor-faktor yang mendorong munculnya TAN. Dari konflik-konflik yang tak kunjung diselesaikan oleh Pemerintah Indonesia, individu maupun kelompok tidak mampu untuk menekan Pemerintah. Secara tidak langsung hal ini melahirkan aktor-aktor separatisme Benny Wenda yang mulai bergerak untuk mencari dukungan internasional dengan bekerja sama dengan aktivis lainnya untuk membentuk jaringan yang lebih besar seperti gerakan-gerakan yang telah disebutkan di atas. Dengan adanya, gerakan-gerakan tersebut membuat Benny Wenda akan lebih mudah menjangkau masyarakat yang lebih luas sehingga akan menimbulkan *boomerang pattern* akibat dari tidak adanya pilihan lain untuk menjangkau Pemerintah. Pada bab selanjutnya akan menganalisis taktik dari Benny Wenda dalam upaya separatisme Papua Barat.

BAB 3

ANALISIS STRATEGI *TRANSNATIONAL ADVOCAVY NETWORK* YANG DIGUNAKAN OLEH BENNY WENDA DALAM UPAYA SEPARATISME

Pada bab ini penulis akan menganalisis strategi yang digunakan oleh Benny Wenda dalam upaya separatisme yang ia lakukan untuk kemerdekaan Papua Barat. Benny Wenda sebagai aktivis terus melakukan upaya-upaya untuk memperluas jaringannya secara global sehingga dapat mempengaruhi publik interasional dan mendapatkan dukungan dari aktor negara maupun non-negara. Aktivitas dari strategi ini disebut juga sebagai *frame resonansi* atau bingkai resonansi yang berfokus pada hubungan dari gerakan organisasi dan kemampuannya untuk memberikan pengaruh pada pemahaman publik yang lebih luas secara individu maupun kolektik (Keck & Sikkink, 1998, p. 17).

Benny Wenda secara aktif mencari cara untuk membawa isu pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Indonesia kepada publik dengan membingkai isu tersebut sedemikian rupa agar dapat tersampaikan pada publik menggunakan isu lama dengan cara yang baru sehingga akan mengubah pemahaman dari aktor lain agar sesuai dengan tujuan dan kepentingannya.

3.1 Strategi *Transnasional Advocacy Network*

Dalam teori konsep yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya, diketahui Keck dan Sikkink membagi empat taktik tipologi yang dapat digunakan oleh aktor TAN dalam upaya persuasif, sosialisasi, dan tekanan untuk mencapai tujuannya (Keck & Sikkink, 1999, p. 95). Pertama, *information poltics* yaitu kemampuan dengan cepat dan tepat dalam menyampaikan informasi yang dapat digunakan

secara politis ke tempat yang akan memberikan pengaruh paling besar (Keck & Sikkink, 1999, p. 95). Kedua, *symbolic politics* yaitu kemampan dalam menggunakan simbol-simbol, tindakan, atau cerita yang masuk akal pada situasi yang tengah terjadi untuk mendapatkan audiens yang lebih luas (Keck & Sikkink, 1999, p. 95). Ketiga, *leverage politics* yaitu upaya untuk memanggil aktor yang lebih kuat dan memanfaat pengaruhya untuk mendapat dukungan dan menjangkau jaringan yang lebih luas (Keck & Sikkink, 1999, p. 95). Keempat, *accountability politics*, yaitu upaya untuk menahan atau mengawasi aktor-aktor untuk tetap pada kebijakan yang telah mereka tetapkan sebelumnya dan telah sesuai dengan yang aktor TAN capai (Keck & Sikkink, 1999, p. 95).

3.1.1 Analisis Taktik *Information Politics* Yang Dilakukan Oleh Benny Wenda

Informasi mengikat anggota jaringan untuk bersama-sama dan menjadikan jaringan menjadi efektif. Dalam menyampaikan informasinya, anggota jaringan melakukannya komunikasi dengan cara informal seperti penggunaan panggilan telepon, e-mail, maupun fax, dan melakukan penyebaran informasi dengan mengedarkan pada surat kabar, pamflet, dan juga buletin. Mereka menyediakan informasi dari sumber yang tidak tersedia maupun terdengar, sehingga anggota TAN harus membuat informasi dapat dipahami dan berguna bagi aktivis dan publik yang posisinya cukup jauh.

Aktor non-negara seperti Benny Wenda mendapatkan pengaruh dengan menjadi sumber informasi alternatif. Arus informasi dalam jaringan advokasi ini tidak hanya memberikan fakta namun juga sebuah kesaksian dari orang-orang yang hidupnya terkena dampak dari isu yang diangkat. Dengan begitu, para aktivis ini

membingkai fakta dan kesaksian ini dengan hal yang benar atau salah, dikarenakan tujuan mereka adalah membujuk dan mendorong orang lain untuk melakukan aksi atas isu tersebut. Agar target sasarannya tepat, informasi yang diberikan oleh jaringan harus dapat dipercaya dan didokumentasikan dengan baik. Untuk mendapatkan perhatian, informasi harus tepat pada waktunya dan dramatis (Keck & Sikkink, 1998, pp. 18-19).

Melalui media sosial dan teknologi yang berkembang pesat di zaman sekarang ini, memudahkan para aktivis separatisme menyebarkan berita dan isu-isu yang terjadi di Papua. Media sosial memiliki keunggulan dalam hal kecepatan dan jangkauan yang lebih cepat dan luas, untuk mengaksesnya pun cukup mudah. Tanpa disadari, dampak dari media sosial dapat lebih besar daripada secara fisik.

Salah satunya adalah Benny Wenda, sebagai aktivis separatisme Papua Barat menggunakan media sosialnya seperti *twitter*, *facebook,* dan *youtube* untuk menyebarkan kampanye tentang kemerdekaan Papua di level internasional dan mendapat dukungan dari masyarakat internasional. Benny Wenda akan terus melakukan pergerakan-pergerakan dan melakukan dialog-dialog untuk mendapat simpati dari masyarakat internasional, jika pemerintah Indonesia tidak dapat memenuhi tuntutannya. Dengan media sosial dan website yang ia miliki, Benny Wenda dapat memposting segala sesuatu yang dapat mendukung tuntutannya. Menggunakan media sosial yang ia miliki untuk menginternasionalisasikan isu Papua Barat ini. Bahkan pada pemilu tahun 2019, Benny Wenda dan kelompok-kelompok pro kemerdekaan Papua Barat mengeluarkan pernyataan untuk memboikot pemilihan presiden karena menurut mereka Presiden Indonesia tidak ada yang mampu untuk menuntaskan kasus HAM yang selama ini berlangsung.

Dengan pernyataan dari Benny Wenda dan kelompok lainnya maka banyak dari mereka yang membakar surat suara pemilu milik mereka sendiri. Tahun 2019 ini kali kedua bagi Papua Barat untuk memboikot pemilu yang sebelumnya terjadi pada tahun 2014 (APR, 2019).

Selain menggunakan media sosial Benny Wenda juga sempat mengisi acara dan seminar seperti pada tahun 2013 pada TEDxSydney di Australia dengan ia tampil dengan pengacaranya Jennifer Robinson yang juga bagian dari ILWP untuk menyampaikan isu Papua Barat dan bagaimana pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia pada rakyat Papua (EDT, West Papua: My People Need Australia's Help Before It's Too Late, 2014). Sedangkan pada tahun 2016, Benny Wenda menjadi pembicara di Universitas Ghana dan acara televisi nasional Ghana yang bertajuk politik (Wenda, 2016). Dalam momen-momen tersebut, Benny Wenda mendapatkan respon yang positif dari audiens yang hadir, dengan begitu ia mendapat dukungan yang lebih banyak dan semakin banyak masyarakat luar yang menyadari adanya konflik yang terjadi di Papua Barat.

Pada hal ini FWPC yang dibentuk oleh Benny Wenda memiliki peran yang cukup penting yaitu membantu untuk menyebarkan informasi dan melakukan kampanye melalui situs resminya yang memudahkan publik untuk mengakses dan mendapatkan informasi.

3.1.2 Analisis Taktik *Symbolic Politics* Yang Dilakukan Oleh Benny Wenda

Symbolic politik yaitu kemampuan untuk menggunakan simbol-simbol, aksi atau cerita yang dapat menggambarkan situasi yang ada, dan membawaya ke masyarakat yang lebih luas. Aktivis membingkai isu dengan mengidentifikasi dan memberikan penjelasan yang meyakinkan untuk peristiwa simbolis yang kuat, yang

dapat menjadi pendorong dan mengembangkan jaringan. Penafsiran dari simbol politik ini adalah bagian dari proses persuasi dimana jaringan menciptakan kesadaran dan memperluas konstituen mereka (Keck & Sikkink, 1999, p. 96).

Benny Wenda yang memiliki peran sebagai aktivis pro kemerdekaan Papua Barat menyerukan aksi-aksi yang berguna untuk menciptakan kesadaran akan isu Papua Barat. Disini Benny Wenda menjadi dalang atas aksi-aksi yang dilakukan untuk menuntuk referendum pada Pemerintah Indonesia. Bekerjasama dengan Komite Nasional Papua Barat (KNPB) yang selanjutnya memanfaatkan Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) untuk turun ke lapangan melakukan dan memprovokasi mahasiswa dan masyarakat sekitar (Hidayatullah, 2019).

Aksi-aksi yang dilakukan oleh Benny Wenda terlihat pada setiap tahunnya pada tanggal tertentu, yaitu pada tanggal 2 agustus diperingati menjadi hari AFC yang pada akhirnya membuat Papua masuk ke wilayah Indonesia dan pada tanggal 15 agustus diperingati sebagai bentuk penolakan dari *New York Agreement*. Aksi demonstrasi dilakukan di seluruh wilayah di Papua Barat dan di seluruh dunia oleh para pendukungnya sebagai bentuk solidaritas. Aksi ini dilakukan dengan mendorong untuk masyarakat turun ke jalan dan menuntut keadilan sejak disahkannya *New York Agreement* (FWPC, 2016).

Selain itu, pada 1 Desember yang diperingati sebagai hari kemerdekaan yang diberikan oleh Belanda pada tahun 1961 sebelum Papua Barat di invasi oleh Indonesia, aksi ini biasanya ditandai dengan mengibarkan bendera nasional Papua Barat yaitu Bintang Kejora. Bendera tersebut menjadi simbol yang mentukan untuk Papua Barat Merdeka. Tidak hanya melakukan pengibaran bendera tetapi Benny Wenda juga melakukan sayembara dengan mengajak para pendukung kemerdekaan

Papua Barat untuk memposting foto dengan bendera Bintang Kejora di tempat unik dan menggunakan tagar *#GlobalFlagRaising* (FWPC, 2017)

Gambar 3. 1 Salah Satu Peserta #GlobalFlagRaising



(Sumber: Situs *Free West Papua Campaign*)

Pada 29 April 2015 silam, Benny Wenda bersama dengan Free West Papua Campaign bergabung dalam aksi *Global Day of Action* untuk akses jurnalis di Papua Barat, dimana pemrintah Indonesia membatasi bahkan melarang jurnalis asing untuk meliput Papua Barat. Hasilnya, ada lebih 20 gerakan demonstrasi bergerak di 10 negara yang berbeda. Hari aksi ini diselenggarakan oleh Organisasi Hak Asasi Manusia TAPOL dan diikuti FWPC, Amnesti Internasional, dan *Survival International*. Demonstrasi ini membuat banyak kesadaran di seluruh dunia tentang situasi di Papua Barat (FWPC, 2015).

Selain menggunakan aksi-aksi demonstrasi, FWPC berkolaborasi dengan *Rize of the Mornig Star* mengadakan konser yang dilaksanakan sebulan penuh untuk menyatukan para seniman dan musisi dalam persatuan kebebasan Papua Barat. Konser ini menampilkan lebih dari 80 band dan diadakan pada lima negara

berbeda yaitu; Australia, Belanda, Afrika Selatan, Inggris, dan Amerika (FWPC, 2016).

Gambar 3. 2 Poster Rockin' For West Papua Concert



Sumber: Situs *Free West Papua Campaign*)

Serta adapun yang baru-baru ini terjadi adalah klaim sepihak dari ULMWP yang diketuai oleh Benny yang menyebutkan bahwa mereka telah membentuk pemerintahan sementara dan Benny Wenda menjadi presiden sementara saat Kongres Rakyat Papua ke-3 diadakan pada akhir tahun 2020 (Lesmana & Ardiansyah, 2020).

3.1.3 Analisis Taktik *Leverage Politics* Yang Dilakukan Oleh Benny Wenda

Aktivis pada jaringan advokasi sangat fokus pada efektivitas politik. Definisi keefektifan yang mereka miliki mencakup pada perubahan kebijakan dari aktor target seperti dalam studi kasus ini yaitu Pemerintah Indonesia. Untuk dapat merubah kebijakan, aktor TAN memerlukan tekanan dan dukungan dari aktor yang lebih kuat daripada jaringan itu sendiri. Untuk meningkatkan pengaruhnya maka jaringan harus mencari pengaruh lain yang lebih kuat untuk dimanfaatkan.

Dalam mengidentifikasi dari *leverage*, Keck dan Sinkink membaginya dengan dua jenis, yaitu *material leverage* dan *moral leverage* (Keck & Sikkink, 1998, p. 23). *Material leverage* biasanya berbentuk sesuatu yang melibatkan uang

atau barang dan hal lainnya seperti bantuan militer dan ekonomi, atau dengan hubungan diplomatik bilateral. Untuk mendapatkan *material leverage* ini aktor jaringan harus meningkatkan profil mereka atau ciri khas mereka yang menonjol menggunakan informasi dan simbol politik. Kemudian anggota jaringan yang lebih kuat menghubungkan kerja sama dengan hal lain yang bernilai, seperti uang, perdagangan, atau keuntungan. Meskipun pengaruh dari aktor non-negara masih sering bergantung pada mempertahankan aliansi yang lebih kuat, namun kredibilitas mereka sebagian masih bergantung pada kemampuannya dalam mempengaruhi opini publik melalui media. Sedangkan, *moral leverage* lebih mengarah pada *mobilization of shame*, dimana perilaku dari aktor target mejadi pusat perhatian internasional (Keck & Sikkink, 1998, pp. 23-24).

Benny Wenda menggunakan taktik *leverage politics* ini untuk mengumpulkan dukungan dari aktor negara dan melakukan upaya-upaya diplomasi ke negara lain guna mendapatkan pengaruh yang lebih kuat. Dengan mengusung isu seperti HAM dan demokrasi, persoalan Papua tidak lagi menjadi urusan domestik tetapi sudah berkembang menjadi isu internasional. Dengan begitu kampanye Papua merdeka mendapatkan simpati dari masyarakat internasional.

Pada tahun 2013 Benny Wenda memulai perjalanan yang ia sebut sebagai "Freedom Tour", dalam perjalanan ini ia menargetkan untuk mengunjungi para pemimpin politik, pengacara, aktivis dan pendukung di beberapa negara untuk membangun dukungan dan kesadaran akan gerakan penentuan nasib sendiri bagi rakyat di Papua Barat (FWPC, 2013).

Benny Wenda sebagai aktivis kemerdekaan Papua Barat melakukan lobi internasional secara bilateral antar negara dan antara forum regional/internasional

dan dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Lobi ini dilakukan secara persuasif kepada pemegang pemerintahan di berbagai negara.

Tabel 3. 1 Upaya Diplomasi Yang Dilakukan Oleh Benny Wenda

No.	Waktu	Diplomasi Benny Wenda		Objek Sasaran
		Upaya Persuasif	Hasil	
1.	Maret 2013	Melakukan diplomasi kemerdekaan Papua Barat dengan melakukan kunjungan "Freedom Tour" ke Melanesia.	• Dukungan Vanuatu terhadap perjuangan dan usaha untuk melepaskan diri dari Indonesia. Hal ini dapat terlihat dari upaya Vanuatu mengangkat isu kemerdekaan Papua Barat dalam Majelis Umum PBB (Manassah, 2013) • Dukungan Perdana Menteri Kepulauan Solomon, terlihat dari diangkatnya isu ini dalam KTT MSG (RNZ, 2013).	• Anggota Parlemen Vanuatu • Perdana Menteri Kepulauan Solomon
2.	Februari 2015	Melakukan diplomasi Kunjungan ke Afrika Selatan untuk bertemu dengan beberapa petinggi demi mencari dukungan untuk kebebasan Papua Barat	• Mendapat respon positif dan dukungan dari keluarga Mandela • Mendapat undangan dan kesempatan untuk membawa isu ini ke parlementer Afrika Selatan (FWPC, 2015)	• Tokoh Masyarakat (Nkosi Zwelivelile Mandela) • Anggota Parlemen Afrika Selatan (Whip Stone Sizani)
3.	Mei 2015	Bersama Octovianus Mote dan Rex Rumakiek melakukan pertemuan dengan kelompok solidaritas Australia dan Selandia Baru guna menggalang dukungan pembebasan Papua Barat	Berkoordinasi juga dengan komunitas Kepulauan Pasifik sepakat untuk mendorong para pemimpin MSG agar dapat menyuarakan Papua Barat dan menjadikan Papua Barat sebagai anggota penuh MSG (FWPC, 2015)	Kelompok Solidaritas Papua Barat Australia dan Selandia Baru
4.	Desember 2015	Kunjungan kedua untuk melanjutkan dan membangun dukungan. Ia bertemu dengan para pendukung dan teman-teman baru untuk membahas kampanye yang telah direncanakan sebelumnya .	• Bertemu dengan lebih banyak lapisan masyarakat • Meningkatnya dukungan yang didapatkan terlihat dari banyaknya kampanye oleh masyarakat dan kelompok solidaritas di Afrika Selatan (FWPC, 2015)	• Masyarakat sipil Afrika Selatan • Tokoh masyarakat • Kelompok Solidaritas Cape Town

No.	Waktu	Diplomasi Benny Wenda		Objek Sasaran
		Upaya Persuasif	Hasil	
5.	Maret 2016	Melakukan kunjungan dipomasi ke Ghana (Wenda, 2016).	• Mendapat respon positif dan dukungan dari tokoh masyarakat untuk pembebasan Papua Barat	• Rev Dr Fred Deegbe (mantan sekretaris jenderal Dewan Kristen Ghana) • John Agyekum Kufuor (mantan presiden periode 2001-2009) • Jerry John Rawling (mantan presiden Ghana periode 1981-2001)
6.	September 2018	Menegaskan pada pemimpin Kepulauan Pasifik untuk secara konsisten dapat memprioritaskan dan mendukung isu Pembebasan Papua Barat dalam PIF (FWPC, 2018)	• Tujuh negara di Kepulauan Pasifik telah mendukung Pembebasan Papua Barat dan mengangkat isu ini dalam Majelis Umum PBB • Terbentuknya *Pacific Coalition for West Papua*	Petinggi Kepulauan Pasifik

Dengan adanya upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Benny Wenda, saat ini ia telah menghasilkan banyak dukungan dari beberapa aktor negara dan juga aktor non-negara. Dengan dukungan dari internasional maka akan menguntungkan Benny Wenda dan kelompok separatisme Papua Barat karena hal itu dapat mewujudkan kepentingannya, yaitu memisahkan diri dari Indonesia (Elisabeth, 2006, pp. 45-46).

Benny memperoleh dukungan dari sebagian negara Kepulauan Pasifik Melanesia. Pada tahun 2016, diketahui ada tujuh negara di Kepulauan Pasifik yang menyatakan dukungannya untuk mengangkat isu penderitaan dan perjuangan rakyat Papua Barat di Sidang Umum PBB. Ketujuh negara tersebut yaitu Nauru, Kepulauan Marshall, Tuvalu, Vanuatu, Kepulauan Solomon, Tonga, dan Palau (FWPC, 2016).

Salah satu Negara di Kepulauan Pasifik Melanesia, Vanuatu, sudah lama menjadi pendukung Papua Barat yang merdeka. Vanuatu sudah banyak memberikan suaka bagi orang-orang Papua Barat yang pro kemerdekaan serta mendukung kemerdekaan Papua Barat di forum internasional, termasuk PBB. Selanjutnya, pada tahun 2015, Melanesian Spearhead Group (MSG), yang terdiri dari Vanuatu, Papua New Guinea, Fiji, dan Kepulauan Solomon, diberikan status *observer* untuk ULMWP, yang dipimpiN oleh Benny Wenda. Dengan adanya status yang diberikan oleh MSG ini maka meningkatkan legitimasi ULMWP dan menjadikan sebagai kelompok pro-kemerdekaan Papua Barat yang menjadi perwakilan di organisasi internasional.

Vanuatu menjadi negara di Kepulauan Pasifik yang paling lantang dalam menyatakan dukungannya kepada gerakan separatisme Papua Merdeka, atas dasar persamaan ras yang cukup dekat. Dukungan Vanuatu terhadap gerakan separatis Papua telah ditunjukan melalui berbagai forum internasional, seperti dalam sidang PBB. Vanuatu fokus untuk menyuarakan isu pelanggaran HAM di Papua yang dapat menyudutkan pihak Indonesia (Sabir, 2018, pp. 95-97). Tidak hanya mendapat dukungan dari negara kepulauan Pasifik, tetapi juga dukungan dari politisi Inggris dan Australia. Jeremy Corbyn, pemimpin partai oposisi Partai Buruh Inggris, adalah pendukung terkenal gerakan kemerdekaan Papua Barat, meskipun ia tidak menerima dukungan dari pemerintah Inggris. Kemudian ada Senator Richard Di Natale dari Australia yang juga ketua *Australian Green Party*. Pada tahun 2017, Natale secara terbuka mengutuk pelanggaran hak asasi manusia di Papua Barat dan menekankan bahwa pemerintah Indonesia menyangkal hak penentuan nasib sendiri rakyat Papua (Tasevski, 2019).

Dari dukungan-dukungan yang telah diterima oleh Benny Wenda, pada tahun 2016 perwakilan Pemerintah dari berbagai negara pendukung mengadakan petemuan di Westminster untuk menyatakan dukungan agar Papua Barat dapat menentukan nasibnya sendiri dengan melakukan pemungutan suara ulang yang diawasai secara internasional dan terbuka, pertemuan ini disebut juga sebagai *Westminster Declaration* (ULMWP, 2016). Terdapat lima poin dalam deklarasi, yaitu:

1. Menyatakan bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang sedang berlangsung tidak dapat diterima
2. Memperingatkan bahwa dengan tidak adanya tindakan internasional, orang asli Papua Barat akan punah
3. Menegaskan kembali hak rakyat Papua Barat atas penentuan nasib sendiri
4. Menyatakan *Act of Free Choice* 1969 sebagai pelanggaran berat terhadap prinsip ini
5. Menyerukan untuk pemungutan suara ulang yang diawasi secara internasional mengenai penentuan nasib sendiri sesuai dengan Resolusi Majelis Umum PBB 1514 dan 1541 (XV)

3.1.4 Analisis Taktik *Accountability Politics* Yang Dilakukan Oleh Benny Wenda

Accountability politics yaitu upaya untuk menahan aktor-aktor yang berkuasa agar tetap pada kebijakan atau prinsip yang telah dinyatakan sebelumnya. Taktik ini digunakan oleh jaringan apabila aktor target dalam studi kasus ini yaitu Pemerintah Indonesia telah menyetujui dan mengubah kebijakannya atas isu yang dipermasalahkan (Keck & Sikkink, 1999, p. 97). Dengan begitu, aktor TAN akan

dapat mengawasi kebijakan dari pemerintah atas komitmen yang telah diberikan. Taktik ini bertujuan untuk melihat wacana dan praktik yang dilakukan oleh aktor target setelah memberikan pernyataannya pada publik.

Dalam hal ini, Benny Wenda belum berhasil untuk mencapai pada taktik *accountability politics* ini karena dari upaya-upaya yang telah ia lakukan seperti membentuk jaringan-jaringan, menyuarakan dan melakukan kampanye melalui media yang ia miliki, melakukan upaya diplomasi pada aktor negara maupun non-negara. Sampai saat ini, masih belum ada titik temu di antara Benny Wenda dengan Pemerintah Indonesia.

Pada tahun 2019, Presiden Jokowi membuka dialog tetapi Benny Wenda mengajukan beberapa syarat yang jika tidak bisa dipenuhi, maka ia tidak menginginkan untuk melakukan dialog tersebut. Syarat-syarat yang disebut oleh Benny Wenda yaitu, penarikan pasukan baik TNI maupun Polri yang berada di perbatasan dan dataran tinggi Papua, Benny Wenda juga meminta adanya mediasi secara internasional dan izin untuk Komisaris Tinggi PBB untuk mengobservasi keadaan yang sedang berlangsung di Papua, dan juga adanya referendum untuk orang-orang Papua Barat (Gunadha, 2019).

Pada tahun 2021 ini, Benny Wenda juga menginginkan adanya negosiasi yang terjadi setelah KKB dinyatakan sebagai teroris. Dalam pernyataannya Benny Wenda mengatakan untuk duduk bersama sebagai sesama Presiden dan menyelesaikan konflik ini dengan damai. Karena menurut Benny Wenda, tudingan itu tidak tepat, karena jusru pemerintahlah yang telah melakukan teror selama 60 tahun ini. Tetapi sampai saat ini belum ada tindak lanjut dari pemerintah (Putri, 2021).

Di sisi lain pemerintah Indonesia telah banyak melakukan dialog-dialog dengan tokoh-tokoh adat dan masyarakat Papua. Menko Polhukam, Mahfud MD mengatakan bahwa representasi masyarakat Papua kini adalah pemerintah daerah, kelompok agama dan kelompok adat. Menurut Mahfud MD kelompok separatis dan kelompok bersenjata masuk dalam daftar yang tidak bisa diajak untuk berdialog dan tidak ada jalan keluar selain dengan penegakan hukum. Hal itu karena pemerintah tetap berpegang pada hasil Pepera tahun 1969 yang mendukung integrasi Papua ke wilayah Indonesia dan itu sudah mutlak (Bonasir, 2021).

Dengan begitu, ketegangan antara kedua belah pihak dapat memburuk karena keduanya mempertahankan posisi yang saling bertentangan dan ekstrim. Pihak Pemerintah mengklaim bahwa Papua bagian dari NKRI yang tak dapat dipermasalahkan, sedangkan dari pihak Benny Wenda sebagai wakil dari aktivis kemerdekaan Papua Barat menyatakan bahwa tujuannya adalah politik kemerdekaan Papua (Strangio, 2021).

Dari ke empat analisis taktik yang telah dijabarkan di atas menunjukkan upaya-upaya yang telah Benny Wenda lakukan sebagai seorang aktivis atau *political entrepreneur* dalam memperjuangkan kemerdekaan Papua Barat. Guna meringkas dari penjelasan tersebut maka dapat ditunjukkan melalui table di bawah ini.

Tabel 3. 2 Strategi *Transnational Advocacy Network* Yang Dilakukan Oleh Benny Wenda

No.	Takik Jaringan	Ada	Tidak Ada	Penjelasan Taktik	Upaya Yang Dilakukan Benny Wenda
1.	*Information Politics*	✓		Peran dari media dalam menyebarkan informasi dapat mendorong penyebaran isu baik di ranah nasional dan internasional, sehingga menjangkau publik yang lebih luas	Benny Wenda menggunakan media sosial, website dan organisasi yang ia buat (FWPC) untuk secara aktif menyebarkan isu pelanggaran HAM dan isu pembebasan Papua Barat
2.	*Symbolic Politics*	✓		Upaya untuk menggunakan simbol, aksi, dan membangun cerita yang sesuai dengan isu yang diangkat dan membawaya ke masyarakat yang lebih luas.	Melakukan aksi-aksi yang dilaksanakan secara konsisten; • Aksi penolakan atas *New York Agreement* setiap tanggal 12 Agustus dengan bentuk demonstrasi • Aksi pengibaran bendera Bintang Kejora setiap tanggal 1 Desember untuk memperingati kemerdekaan Papua Barat yang diberikan oleh Belanda • Mengikuti aksi Global Day of Action untuk akses jurnalis, karena Pemerintah Indonesia membatasi akses jurnalis asing untuk mengangkat isu Papua Barat • Mengadakan konser *Rockin' For West Papua* yang diadakan di 5 negara
3.	*Leverage Politics*	✓		Upaya untuk mendapatkan bantuan dari aktor yang memiliki kekuasaan agar dapat memberikan dampak, sehingga mampu memperkuat jaringan transnasional	• Melakukan upaya-diplomasi pada aktor negara maupun non-negara guna mendapatkan dukungan internasional • Melakukan "Freedom Tour" ke wilayah Melanesia, Australia, Amerika, dan Afrika pada tahun 2013
4.	*Accountability Politics*		✓	Upaya untuk menahan aktor-aktor yang berkuasa agar tetap pada kebijakan atau prinsip yang telah dinyatakan sebelumnya, dalam hal ini adalah untuk mengawasi aktor target	Benny Wenda tidak dapat melakukan *accountability politics* pada Pemerintah Indonesia karena tidak ada kebijakan atas solusi dari isu yang diangkat, yaitu melakukan referendum Papua Barat

Sumber: diolah dalam Tipologi Taktik oleh Keck & Sikkink (1999)

3.2 Pencapaian Dari Pengaruh Benny Wenda Untuk Melakukan Separatisme

Untuk menilai pengaruh yang dilakukan oleh jaringan advokasi, Keck dan Sikkink telah membaginya ke dalam lima poin: (1) pembuatan isu dan penetapan agenda; (2) pengaruh pada posisi diskursif negara maupun organisasi regional dan internasional; (3) pengaruh terhadap prosedur kelembagaan; (4) pengaruh pada perubahan kebijakan aktor target, yaitu pemerintah maupun organisasi internasional atau sektor pribadi; (5) pengaruh pada perubahan perilaku negara (Keck & Sikkink, 1999, p. 98).

Benny Wenda sebagai aktor TAN telah banyak melakukan upaya-upaya untuk mencapai tujuannya, yaitu membebaskan Papua Barat dari Indonesia. Dengan upaya yang telah dilakukannya, maka akan dianalisis dengan menggunakan lima jenis tahapan oleh Keck dan Sikkink (Keck & Sikkink, 1998, p. 28). Pertama, jaringan advokasi menghasilkan perhatian pada isu-isu baru dan membantunya untuk menetapkan agenda setelah menghasut media, melakukan debat, mendengarkan pendapat, dan melakukan pertemuan pada isu yang sebelumnya tidak menjadi bahan perdebatan publik. Upaya Benny Wenda dalam membangun isu pelanggaran HAM yang terjadi di Papua akibat dari Pemerintah Indonesia berhasil menarik perhatian dunia internasional. Dengan memanfaatkan media sosial yang ia miliki, Benny Wenda berhasil untuk menggiring opini-opini publik dan meningkat kesadaran pada isu tersebut.

Kedua, keberhasilan jaringan advokasi dapat terlihat dalam memengaruhi posisi diskursif suatu negara maupun organisasi internasional ketika aktor TAN melakukan dialog persuasi guna mendapatkan dukungan dari internasional (Keck

& Sikkink, 1998, pp. 28-29). Dalam upaya ini, Benny Wenda berhasil untuk mendapatkan dukungan dari aktor negara maupun aktor non-negara, disini terlihat dari adanya tujuh negara dari Kepulauan Pasifik yaitu Nauru, Kepulauan Marshall, Tuvalu, Vanuatu, Kepulauan Solomon, Tonga, dan Palau, yang mengangkat isu Papua Barat dalam Sidang Umum PBB.

Ketiga, dalam menentukan keberhasilan dari jaringan advokasi juga dapat terlihat dari adanya pengaruh pada prosedur kelembagaan sehingga membuat komitmen yang mengikat sesuai dengan isu yang dipermasalahkan (Keck & Sikkink, 1998, p. 25). Benny Wenda, bersama dengan organisasi yang ada dibawahnya ILWP dan IPWP berhasil untuk mengumpulkan perwakilan politik dari berbagai wilayah untuk melakukan perundingan yang disebut sebagai *Westminster Declaration*. Dalam deklarasi ini setidaknya ada 21 anggota parlemen yang menandatangani pernyataan atas dukungan kemerdekaan Papua Barat yang mencakup lima poin.

Keempat, kondisi lainnya yaitu melihat sejauh mana jaringan dapat memengaruhi perubahan kebijakan dari aktor target yaitu negara, organisasi internasional, atau perusahaan multi nasional (Keck & Sikkink, 1998, pp. 25-26). Pada tahap ini, upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Benny Wenda belum mampu untuk membuat kebijakan Indonesia berubah karena sampai saat ini Pemerintah Indonesia masih tetap pada pendiriannya bahwa Papua adalah bagian dari NKRI.

Kelima, tahapan ini melihat keberhasilan dari bagaimana upaya aktor memengaruhi perubahan perilaku dari aktor target (Keck & Sikkink, 1998, p. 26). Setelah melakukan upaya-upaya yang membuat isu Papua Barat menjadi isu

internasional. Menjadikan Indonesia sebagai sorotan internasional dan menjadi tekanan tersendiri bagi Pemerintah. Dalam hal ini, perilaku Pemerintah Indonesia dalam menanggapi isu kemerdekaan Papua Barat yaitu melakukan kunjungan diplomasi pada negara-negara yang mendukung atas gerakan pro kemerdekaan Papua Barat. Aksi yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia sebagai sikap untuk membendung dan menjawab atas pernyataan propaganda maupun aksi-aksi yang secara konsistes dilakukan oleh Benny Wenda. Dengan begitu, Benny Wenda belum berhasil mencapai tahapan ini karena belum adanya perubahan perilaku pada Pemerintah Indonesia.

BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan di bab sebelumnya penulis akan memaparkan strategi yang dilakukan oleh Benny Wenda untuk membebaskan Papua Barat dari Indonesia. Konflik yang terjadi antara Pemerintah Indonesia dengan penduduk asli Papua Barat memang sudah lama terjadi dan setidaknya ada empat masalah utama yang membuat konflik ini memanas, yaitu yang pertama sejarah proses integrasi Papua ke Indonesia yang dinilai bahwa prosesnya tidak sesuai karena suara yang diberikan tidak mewakili seluruh orang-orang Papua, kedua operasi militer dan pelanggaran HAM yang terjadi sejak integrasi wilayah Papua dan sampai sekarang tidak pernah di usut tuntas kasusnya, ketiga termarjinalkannya orang-orang Papua karena adanya transmigrasi besar-besaran yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Yang terakhir adalah terlambatnya pembangunan baik dari segi infrastruktur, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Dengan keterlambatan itu penduduk asli Papua tidak bisa bersaing dengan para pendatang karena minimnya fasilitas yang diberikan. Faktor-fakor inilah yang menyebabkan munculnya kecemburuan sosial dan menyebabkan kesenjangan sosial.

Dalam kondisi tersebut maka jaringan advokasi akan muncul sebagai akibat dari adanya isu tersebut. Faktor lain yang memicu kemuculan dari jaringan advokasi yaitu adanya aktivi atau *political entrepreuners* yang percaya bahwa dengan adanya jaringan maka akan membantu misi dan kampanye agar menjangkau publik yang lebih luas. Dalam studi kasus ini, Benny Wenda bertindak sebagai *political entrepreuners* dengan menggunakan jaringan yang ia buat. Jaringan tersebut yaitu

ULMWP, IPWP, ILWP, dan FWPC yang dengan adanya jaringan ini maka Benny Wenda akan dapat memperluas pengaruhnya dan mendapatkan dukungan dari aktor negara dan aktor non-negara. Untuk dapat menganalisis upaya-upaya yang dilakukan oleh Benny Wenda untuk melakukan separatisme Papua Barat maka akan dianalisis dengan menggunakan empat taktik dari Keck dan Sikkink, yaitu *information politics, symbolic politics,* dan *leverage politics*.

Information politics dilakukan dengan menggunakan media informasi agar dapat meyebarkan informasi secara cepat. Benny Wenda menggunakan media sosialnya untuk menyebarkan isu-isu pelanggaran HAM di Papua Barat, ia juga menggunakan jaringannya yaitu FWPC sebagai media dalam penyebaran infomasi dan kampanye. Selain itu, Benny Wenda juga aktif dalam menjadi narasumber pada seminar maupun media elektronik. Sehingga isu di Papua Barat akan menyita perhatiab dunia internasional. *Symbolic politics* dilakukan dengan menggunakan simbol-simbol politik, melakukan aksi, dan membuat kisah yang didasari atas isu tersebut. Pada taktik ini ditandai dengan pengibaran bendera Bintang Kejora sebagai bendera nasional Papua Barat dan dilakukan setiap 1 Desember, selain itu adanya aksi-aksi yang dilakukan di wilayah-wilayah pendukung kemerdekaan Papua Barat seperti aksi penolakan AFC dan *New York Agreement* pada bulan agustus. *Leverage politics*, taktik ini digunakan oleh Benny Wenda untuk mendapatkan pengaruh dari aktor-aktor yang lebih kuat. Pada tahun 2013, ia melakukan *Freedom Tour* untuk melakukan kunjungan pada negara-negara dan melakukan diplomasi pada perwakilan politik di wilayah tersebut. Tidak berhenti disitu, Benny Wenda juga melakukan kunjungan ke wilayah Afrika dan Selandia Baru untuk menggalang dukungan. Setelah melakukan upaya diplomasi, Benny

Wenda mendapatkan dukungannya yang cukup banyak, seperti dukungan dari tujuh negara Kepulauan Pasifik yang mengangkat isu ini dalam Majelis Umum PBB, tidak hanya itu pada tahun 2016, Benny Wenda melalui jaringannya yaitu IPWP dan ILWP berhasil mengumpulkan perwakilan politik dari beberapa negara pendukung yang menghasilkan *Westminster Declaration*.

Sedangkan untuk taktik *accountability politics* Benny Wenda belum berhasil dalam melakukan taktik ini dikarenakan Pemerintah Indonesia sampai saat ini masih bersikukuh pada pendiriannya bahwa wilayah Papua termasuk dalam wilayah NKRI dan tidak dapat diganggu gugat.

Setelah melakukan taktik-taktik di atas, maka selanjutnya penulis akan mengidentifikasi pencapaian atas pengaruh yang dimiliki oleh Benny Wenda. Setelah dijabarkan, ternyata dari kelima pencapaian pengaruh Benny Wenda hanya mencapai pada tiga tahapan, yaitu menarik dunia internasional melalui media, meningkatnya dukungan dari aktor negara maupun non-negara setelah melakukan dialog persuasi, serta adanya *Westminter Declaration* sebagai bentuk dari adanya prosedur untuk kemerdekaan Papua Barat dan membebaskan orang Papua dari pelanggaran HAM yang terjadi.

Pencapaian keempat dan kelima belum mampu untuk dipengaruhi karena sampai saat ini dari pihak Pemerintah Indonesia belum ada perubahan kebijakan maupun perubahan perilaku atas isu yang diangkat oleh Benny Wenda. Walaupun pada tahun 2019 kemarin, Presiden Joko Widodo sempat membuka untuk melakukan dialog dengan kelompok-kelompok separtisme namun karena

Pemerintah Indonesia tidak mampu untuk memenuhi syarat yang diajukan oleh Benny Wenda maka dialog tersebut tidak terjadi.

Pada penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa strategi *Transnasional Advocacy Network* yang dilakukan oleh Benny Wenda dalam upaya separatisme belum berhasil. Meskipun dalam prosesnya, dukungan terhadap Benny Wenda dalam upaya pembebasan Papua Barat meningkat dan mendapat perhatian internasional dari beberapa negara dan non-negara di internasional.

4.2 Rekomendasi Penelitian

Pada tujuan penelitian ini penulis berkeyakinan bahwa analisis upaya separatisme Papua Barat yang dilakukan oleh Benny Wenda dengan menggunakan analisis strategi *Transnasional Advocacy Network* memberikan perspektif baru dalam ilmu pengetahuan. Namun, sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa masih adanya keterbatasan dalam penelitian menggunakan metode tersebut. Dengan adanya keterbatasan tersebut tidak menutup kemungkinan untuk penelitian lebih lanjut dengan metode yang berbeda. Penelitian menggunakan metode diplomasi publik sebagai resolusi konflik dan melakukan analisis lebih dalam bagaimana aktivis atau kelompok separatisme seperti Benny Wenda dalam berkomunikasi di level internasional dan respon dari Pemerintah Indonesia. Penulis yakin dengan melakukan kajian-kajian yang berbeda mungkin akan menjadi pemahaman yang menarik dan lebih luas ruang lingkupnya.

DAFTAR PUSTAKA

Anderson, B. (2015). *Papua's Insecurity: State Failure in the Indonesian Periphery.* Honolulu: East West Center.

Anderson, K. (2015). Colonialism and Cold Genocide: The Case of West Papua. *Genocide Studies and Prevention: An International Journal*, 11-13.

Antonopoulos, P., & Cottle, D. (2019). Forgotten Genocide in Indonesia: Mass Violence, Resource Exploitation and Struggle for Independence in West Papua. In F. Jacob, *Genocide and Mass Violence in Asia* (pp. 160-163). Berlin: De Gruyter.

APR. (2019, April 19). *West Papuan Boycott of Indonesian Election Successful, says Campaign*. Retrieved from Asia Pacific Report: https://asiapacificreport.nz/2019/04/19/west-papuan-boycott-of-indonesian-election-successful-says-campaign/

Bonasir, R. (2021, Mei 31). *Banyak Sandungan Menuju Ruang Dialog Papua, Siapa Wakilnya dan Apa Agendanya?: Jelas Tentang Hak-Hak Bangsa Papua Untuk Merdeka*. Retrieved from BBC News: https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-57255902

Cann, E. (2011). *The Indiscriminate Use of Explosive Weapons Against Papuan Civilians.* London.

Damarjati, D. (2019, Juli 18). *Jejak Benny Wenda Kabur Dari Penjara Diburu Interpol dan Hidup di Inggris*. Retrieved from Detik News: https://news.detik.com/berita/d-4630184/jejak-benny-wenda-kabur-dari-penjara-diburu-interpol-hidup-di-inggris

Druce, S. C. (2020). Political Impasse vs Economic Development: A History and Analysis of the West Papua Conflict in Indonesia. In M. Oishi, *Managing Conflict in A Globalizing ASEAN* (pp. 90-102). Singapore: Springer.

EDT. (2014, April 27). *West Papua: My People Need Australia's Help Before It's Too Late*. Retrieved from The Guardian:

https://www.theguardian.com/commentisfree/2014/apr/28/west-papua-my-people-need-australias-help-before-it-is-too-late

Elisabeth, A. (2006). Dimensi Internasional Papua. *Jurnal Penelitian Politik Vol 3. No 1*, 45-46.

Firdaus, F., Tjin, T. P., & Ilman, H. (2020, Januari 18). *The Unbroken Spirit of Benny Wenda*. Retrieved from New Naratif: https://newnaratif.com/journalism/the-unbroken-spirit-of-benny-wenda/share/xuna/14719e695e2aed484baff9d12f29bd2d/

FWPC. (2004). *About the Campaign*. Retrieved from Free West Papua Campaign: https://www.freewestpapua.org/info/about-the-campaign/

FWPC. (2013, January 22). *Benny Wenda to Depart on "Freedom Tour"*. Retrieved from Free West Papua Campaign Organization: https://www.freewestpapua.org/2013/01/22/benny-wenda-to-depart-on-freedom-tour/

FWPC. (2015, Desember 9). *FWPC Travel to Souh Africa and Meet with Civil Society Leaders*. Retrieved from Free West Papua Campaign: https://www.freewestpapua.org/2015/12/09/fwpc-travel-to-south-africa-and-meet-with-civil-society-leaders/

FWPC. (2015, Mei 1). *Global Day of Actionfor Journalist Access in West Papua*. Retrieved from Free West Papua Campaign: https://www.freewestpapua.org/2015/05/01/global-day-of-action-for-journalist-access-in-west-papua/

FWPC. (2015, March 4). *West Papuan Independence Leader and Nobel Peace Prize Nominee Benny Wenda Tours South Africa*. Retrieved from Free West Papua Campaign: https://www.freewestpapua.org/2015/03/04/benny-wenda-tours-south-africa/

FWPC. (2015, Maret 31). *West Ppauan Leaders Meet Solidarity Groups in Brisbane, Australia*. Retrieved from Free West Papua Campaign:

https://www.freewestpapua.org/2015/03/31/west-papua-leaders-meet-solidarity-groups-in-brisbane-australia/

FWPC. (2016, Oktober 28). *Global Peace Concert - Rockin' for West Papua raises Free West Papua Support Arround the World*. Retrieved from Free West Papua Campaign: https://www.freewestpapua.org/2016/10/28/global-peace-concert-rockin-for-west-papua-raises-free-west-papua-support-around-the-world/

FWPC. (2016, Agustus 26). *Rallies for West Papua Held Across The World on The Day of Broken Promise*. Retrieved from Free West Papua Campaign: https://www.freewestpapua.org/2016/08/23/rallies-for-west-papua-held-across-the-world-on-the-day-of-broken-promise/

FWPC. (2016, September 27). *Seven Countries Support West Papua at the UN General Assembly*. Retrieved from Free West Papua Campaign: https://www.freewestpapua.org/2016/09/27/seven-countries-support-west-papua-at-the-un-general-assembly/

FWPC. (2017, November 10). *Join The Global Flag Raising for West Papua. 1st December!* Retrieved from Free West Papua Campaign: https://www.freewestpapua.org/2017/11/10/join-the-global-flag-raising-for-west-papua-1st-december/

FWPC. (2018, Agustus 28). *A Call for Pacific Islands Forum Leader to Take West Papua to the UN*. Retrieved from Free West Papua Campaign: https://www.freewestpapua.org/2018/08/28/action-needed-to-call-upon-pacific-islands-forum-leaders-to-take-west-papua-to-the-un/

Gietzelt, D. (1989). The Indonesiazation of West Papua. *Ocenia Publications, University of Sydney*, 201-210.

Gunadha, R. (2019, Oktober 1). *Jokowi Buka Peluang Bertemu, Benny Wenda ULMWP: Tarik Dulu TNI dari Papua*. Retrieved from suara.com: https://www.suara.com/news/2019/10/01/141508/jokowi-buka-peluang-bertemu-benny-wenda-ulmwp-tarik-dulu-tni-dari-papua?page=2

Hernawan, B., Elmslie, J., & Pas, R. v. (2015). *Human Riights in West Papua 2015: The Fourth Report of the International Coalition for Papua.* Wuppertal: ANU Press.

Hidayatullah, A. (2019, September 24). *Polisi Sebut Beny Wenda Berperan di Balik Kerusuhan Jayapura*. Retrieved from suara.com: https://www.suara.com/news/2019/09/24/053500/polisi-sebut-benny-wenda-berperan-di-balik-kerusuhan-waena

Idrus, M. (2009). *Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif.* Yogyakarta: Erlangga.

ILWP. (2014, November 19). *What We Do*. Retrieved from Intenaional Lawyers of West Papua: https://www.ilwp.org/what-we-do

IPWP. (2010, Januari 27). *IPWP Launches in European Parliament*. Retrieved from International Parliamentarians for West Papua: https://www.ipwp.org/ipwp-news/ipwp-launches-in-european-parliament/

Keck, M. E., & Sikkink, K. (1998). *Activist Beyond Border: Advocacy Networks in International Politics.* London: Cornell University Press.

Keck, M. E., & Sikkink, K. (1999). Transnational Advocacy Networks in International and Regional Politics. *International Social Science Journal, Vol 68*, 98.

Lesmana, A. S., & Ardiansyah, N. (2020, December 1). *ULMWP Deklarasikan Pemerintahan Sementara, DPR: Papua Tetap NKRI*. Retrieved from suara.com: https://www.suara.com/news/2020/12/01/214238/ulmwp-deklarasikan-pemerintahan-sementara-dpr-papua-tetap-nkri?page=all

Ligo, G. (2014, Desember 10). *West Papuans Unite Under New Umbrella Group*. Retrieved from Daily Post Vanuatu: https://dailypost.vu/news/local_news/west-papuans-unite-under-new-umbrella-group/article_ff875941-551a-5730-a394-052caccb6ed3.html

Manassah, K. (2013, Maret 23). *Vanuatu - The Timeline*. Retrieved from Pacific Institute of Public Policy: http://pacificpolicy.org/2013/03/vanuatu-the-timeline/

Mollet, J. A. (2011). he Dynamics of Contemporary Local-Government Policies and Economic Development in West Papua. *Development in Practive, Volume 21, Number 2*, 237-240.

Nainggolan, P. P. (2014). Aktivitas Internasional Gerakan Separatisme Papua. *Kajian Vol. 19 No. 3*, 188-196.

Pamungkas, C. (2017). The Campaign of Papua Peace Network for Papua Peace Land. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 147-149.

Phillpot, S. (2018). This Stillness, This Lack of Incident: Making Conflict Visible in West Papua. *Critical Asian Studies*, 260-266.

Putri, B. U. (2021, Mei 3). *Kecam Label Teroris ke KKB, Benny Wenda Ajak Jokowi Cari Solusi Damai*. Retrieved from Tempo: https://nasional.tempo.co/read/1458790/kecam-label-teroris-ke-kkb-benny-wenda-ajak-jokowi-cari-solusi-damai/full?view=ok

RNZ. (2013, April 26). *Solomon Island Prime Minister Shows Support for West Papua*. Retrieved from Radio New Zealand: https://www.rnz.co.nz/international/pacific-news/211752/solomon-islands-prime-minister-shows-support-for-west-papua

Rusdiarti, S. R., & Pamungkas, C. (2017). *Papua Road Map (Proses Perdamaian, Politik Kaum Muda, dan Daispora Papua)*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Sabir, A. (2018). Diplomasi Publik Indonesia terhadap Vanuatu dalam Upaya Membendung Gerakan Separatisme Papua. *Jurnal Hubungan Internasional, Tahun XI, No.1*, 95-97.

Strangio, S. (2021, Juni 27). *Adriana Elisabeth on the Conflict in West Papua*. Retrieved from The Diplomat: https://thediplomat.com/2021/07/adriana-elisabeth-on-the-conflict-in-west-papua/

Tasevski, O. (2019, July 25). *West Papua's Quest for Independence*. Retrieved from The Diplomat: https://thediplomat.com/2019/07/west-papuas-quest-for-independence/

Taum, Y. Y. (2015). Kekerasan dan Konflik di Papua: Akar Masalah dan Strategi Mengatasinya. *Jurnal Penelitian. Volume 19, No. 1, November*, 9-11.

ULMWP. (2016, Mei 3). *Westminster Declaration*. Retrieved from United Liberation Movement of West Papua: https://www.ulmwp.org/westminster-declaration

Viartasiwi, N. (2018). The Politics of History in West Papua Indonesia Conflict. *Asian Jornal of Poliical Science*, 1-9.

Wenda, B. (2016, Maret 23). *Press Release: West Papuan Independence Leader Benny Wenda Visits Ghana*. Retrieved from Free West Papua Campaign: https://www.freewestpapua.org/2016/03/23/press-release-benny-wenda-visits-ghana/

Widjojo, M. S. (2009, Oktober 31). *Benny Wenda, IPWP dan Sikap Pemerintah Inggris*. Retrieved from Pusat Penelitian Politik: http://www.politik.lipi.go.id/kolom/kolom-1/kolom-papua-2/83-benny-wenda-ipwp-dan-sikap-pemerintah-inggris-

Widjojo, M. S. (2011, November 16). *Riset LIPI: Empat Akar Masalah Konflik Papua*. Retrieved from LIPI: http://lipi.go.id/berita/single/Riset-LIPI-Empat-Akar-Masalah-Konflik-Papua/5818